



**PENGARUH PENGUNGKAPAN *SUSTAINABILITY REPORTING*
TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK**
(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)

SKRIPSI

Oleh:

Mery Dwi Ayuwandari

160810301081

**PROGRAM STUDI STRATA SATU AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2020



**PENGARUH PENGUNGKAPAN *SUSTAINABILITY REPORTING*
TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK**
(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Program Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Oleh

Mery Dwi Ayuwandari

NIM 160810301081

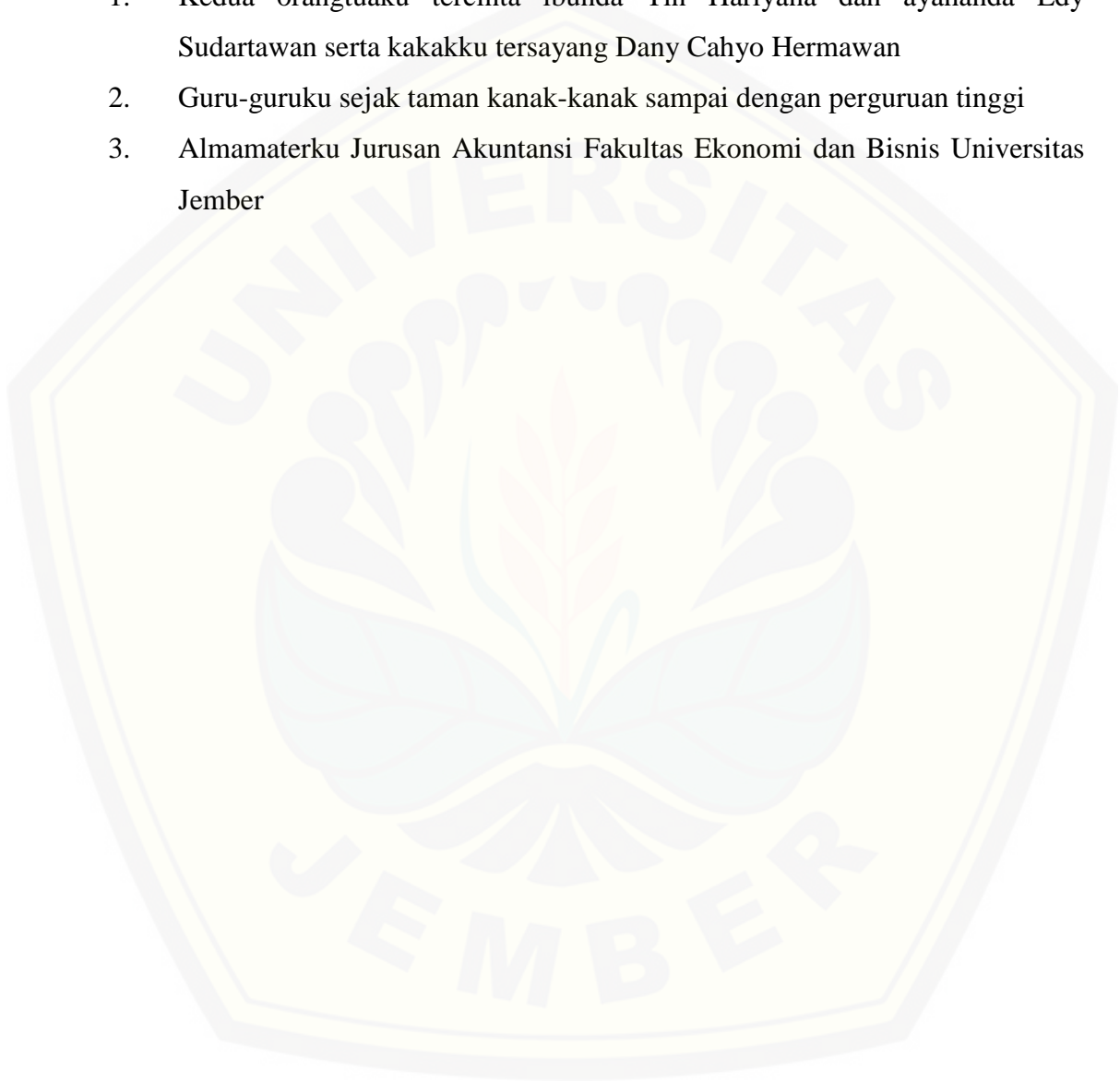
**PROGRAM STUDI STRATA SATU AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2020

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

1. Kedua orangtuaku tercinta ibunda Tin Hariyana dan ayahanda Edy Sudartawan serta kakakku tersayang Dany Cahyo Hermawan
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi
3. Almamaterku Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember



MOTTO

“Dan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya”

(HR. At-Tirmidzi No 1162)

“ Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai ”

(Anonim)

“Selalu ada harapan bagi orang yang berdoa dan selalu ada jalan bagi orang yang berusaha”

(Anonim)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mery Dwi Ayuwandari

NIM : 160810301081

Judul Skripsi : Pengaruh Pengungkapan *Sustainability Reporting* Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan karya jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar – benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 April 2020

Yang menyatakan,

Mery Dwi Ayuwandari

NIM 160810301081

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Pengungkapan *Sustainability Reporting* Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)

Nama Mahasiswa : Mery Dwi Ayuwandari

NIM : 160810301081

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 9 April 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Wasito, M.Si, Ak.
NIP. 196001031991031001

Dewi Ayu Puspita, SE., MSA., Ak.
NIP. 198602162015042003

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS
NIP 19780927 200112 1 002

SKRIPSI

**PENGARUH PENGUNGKAPAN *SUSTAINABILITY REPORTING*
TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK**
(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)

Oleh
Mery Dwi Ayuwandari
160810301081

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Drs. Wasito, M.Si, Ak.

Dosen Pembimbing II : Dewi Ayu Puspita, SE., MSA., Ak.

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**PENGARUH PENGUNGKAPAN *SUSTAINABILITY REPORTING* TERHADAP
PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK**

(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mery Dwi Ayuwandari

NIM : 160810301081

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

18 Mei 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si., Ak (.....)
NIP. 196701021992032002

Sekretaris : Drs. Sudarno, M.Si., Ak., CA., CSRS (.....)
NIP. 196012251989021001

Anggota : Indah Purnamawati., S.E., M.Si., Ak (.....)
NIP. 196910111997022001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.
NIP. 197107271995121001

Mery Dwi Ayuwandari

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pengungkapan *Sustainability Reporting* terhadap Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 ”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) Pengaruh pengungkapan aspek ekonomi dalam *sustainability reporting* terhadap praktik penghindaran pajak; 2) Pengaruh pengungkapan aspek lingkungan dalam *sustainability reporting* terhadap praktik penghindaran pajak; dan 3) Pengaruh pengungkapan aspek sosial dalam *sustainability reporting* terhadap praktik penghindaran pajak. Metode *sampling* yang digunakan adalah menggunakan *purposive sampling* dengan total jumlah data sebanyak 38. Variabel independen yang ada dalam penelitian ini sebanyak 3 variabel ditambah variabel kontrol 2 yakni profitabilitas dan ukuran perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengungkapan aspek ekonomi berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak; 2) pengungkapan aspek lingkungan tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak; dan 3) pengungkapan aspek sosial tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.

Kata kunci: Pengungkapan *sustainability reporting*, penghindaran pajak

Mery Dwi Ayuwandari

Accounting Departement, Economic And Business Faculty, Jember University

ABSTRACT

This study is entitled “The Effect of Sustainability Reporting Disclosure on Tax Avoidance Practices in Indonesia’s Mining Companies that are listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2018”. This study aims to analyze: 1) The effect of sustainably reporting’s economic aspect disclosure on tax avoidance practices; 2) The effect of sustainably reporting’s environment aspect disclosure on tax avoidance practices; and 3) The effect of sustainably reporting’s social aspect disclosure on practice of tax avoidance. The sampling method used was using purposive sampling with total amount of data as much as 38. Independent variables in this study were 3 plus control variables 2 namely profitability and company size. The analytical tool used is Multiple Linear Regression. The result show that : 1) Disclosure of economic aspects effect the practice of tax avoidance; 2) disclosure of environment aspects does not affect the practice of tax avoidance; and 3) disclosure of social aspects does not affect the practice of tax avoidance on mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2014-2018 period.

Keywords : Sustainability Reporting Disclosure, Tax Avoidance

RINGKASAN

Pengaruh Pengungkapan *Sustainability Reporting* Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018) Mery Dwi Ayuwandari; 160810301081; 64 halaman; Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini bisa dilihat dari rasio pajak Indonesia yang selama 5 tahun berturut-turut hanya berada pada kisaran 10-12 %. Angka tersebut dapat dikatakan rendah dibandingkan angka ideal rasio pajak standar internasional yang berada pada kisaran 15 % keatas. Selain itu jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang memiliki *economy size* serupa, Indonesia masih berada di paling bawah sendiri. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus penghindaran pajak yang terjadi setiap tahunnya. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto menduga bahwa angka penghindaran pajak per tahunnya dapat mencapai 110 triliun. Tindakan Penghindaran pajak tersebut paling banyak dilakukan oleh badan usaha yakni sebesar 80 % dan 20 % dilakukan oleh perorangan. Oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait penghindaran pajak di Indonesia. peneliti kemudian memutuskan untuk meneliti tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak di Indonesia dengan objek penelitian yaitu perusahaan pertambangan karena jika dilihat pada laporan “APBN Kitat per Oktober 2019” penerimaan pajak perusahaan pertambangan mengalami perlambatan paling besar yakni 20,6%. Pengungkapan *sustainability reporting* peneliti pilih sebagai aspek penelitian karena isu ini juga merupakan isu yang baru di dunia per akuntansian sesuai diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POKJ.03/2017 Pasal 2 ayat 1 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha perusahaan tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengungkapan *sustainability reporting* terhadap praktik penghindaran pajak. Sehingga perlu adanya penelitian

lebih lanjut terkait pengaruh dari diterbitkannya peraturan tersebut. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan bukti secara empiris pengaruh *sustainability reporting* terhadap praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yakni berupa laporan berkelanjutan dari perusahaan pertambangan tahun 2014-2018. Pengujian datanya menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang bersifat kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan metode *purposive sampling*. Variabel yang diteliti ada tiga yakni pengungkapan aspek ekonomi, lingkungan, sosial menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak adalah aspek ekonomi.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat hidup, kasih sayang, kemudahan dan kelancaran, serta segala hal yang terbaik untuk hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari upaya, doa, dukungan, dan bimbingan dari keluarga maupun dosen pembimbing serta pihak lainnya. Pada kesempatan ini penulis dengan sepuh hati mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak. selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Drs. Wasito, M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing I dan Dewi Ayu Puspita, SE., MSA., Ak. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
5. Rochman Effendi, SE,M.Si,Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa
6. Kedua orangtuaku Tin Hariyana dan Edy Sudartawan serta kakakku Dany Cahyo Hermawan yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tak pernah putus serta menjadi penyemangat untukku selama ini.
7. Teman seperbimbingan Riski Amelia, Kiki Afkarina, Nadia Puspita, Ratna Ayu E., dan Yunaira Setyo

8. Teman semasa menjadi mahasiswa dan selalu membantu Mega Devita, Hariyati Pratiwi, Rini Fatmasari, serta Anindya yang membantu terselesainya tugas akhir ini
9. Teman semasa menjadi mahasiswa junior Dhia Palupi, Sunan Amilia, Yuni, dan Juuliani
10. Geng darjo Wiyasih Zerlinda, Destania, Shivy, Elsa Eldis, Sari yang sudah menghibur dan ngajak liburan
11. KKN 150 Mlandingan Wetan Dinda, Rofi'atus, Anindya, Lidia, Icha, Yoland, Denina dan lainnya, Pengurus KSPM, serta Mahasiswa Akuntansi Angkatan 2016 yang telah memberikan banyak pengalaman berharga
12. dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu proses penyelesaian penyusunan skripsi ini dengan tulus dan ikhlas yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan senang hati dan tangan terbuka penulis menerima saran dan kritik yang berguna untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Jember, 11 April 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
RINGKASAN.....	x
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Stakeholder.....	8
2.1.2 Pajak.....	10
2.1.3 Penghindaran Pajak.....	13
2.1.4 Sustainability Reporting.....	15
2.1.5 Aspek Ekonomi.....	16
2.1.6 Aspek Lingkungan.....	17
2.1.7 Aspek Sosial.....	19

2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Kerangka Pemikiran.....	25
2.4 Hipotesis Penelitian.....	25
2.4.1 Pengaruh Pengungkapan Aspek Ekonomi Terhadap Praktik Penghindaran Pajak.....	25
2.4.2 Pengaruh Pengungkapan Aspek Lingkungan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak.....	26
2.4.3 Pengaruh Pengungkapan Aspek Sosial Terhadap Praktik Penghindaran Pajak.....	27
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian.....	29
3.3.1 Populasi Penelitian.....	29
3.3.2 Sampel Penelitian.....	30
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	30
3.4.1 Variabel Dependen.....	30
3.4.2 Variabel Independen.....	30
3.4.3 Variabel Kontrol.....	31
3.5 Teknik Analisis Data.....	32
3.5.1 Statistik Deskriptif.....	32
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	32
3.6 Uji Hipotesis.....	34
3.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	34
3.6.2 Uji Kelayakan Model.....	35
3.6.3 Uji Koefisien Determinasi.....	35
3.6.4 Uji Signifikansi Variabel.....	35
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	36
4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	37
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	38

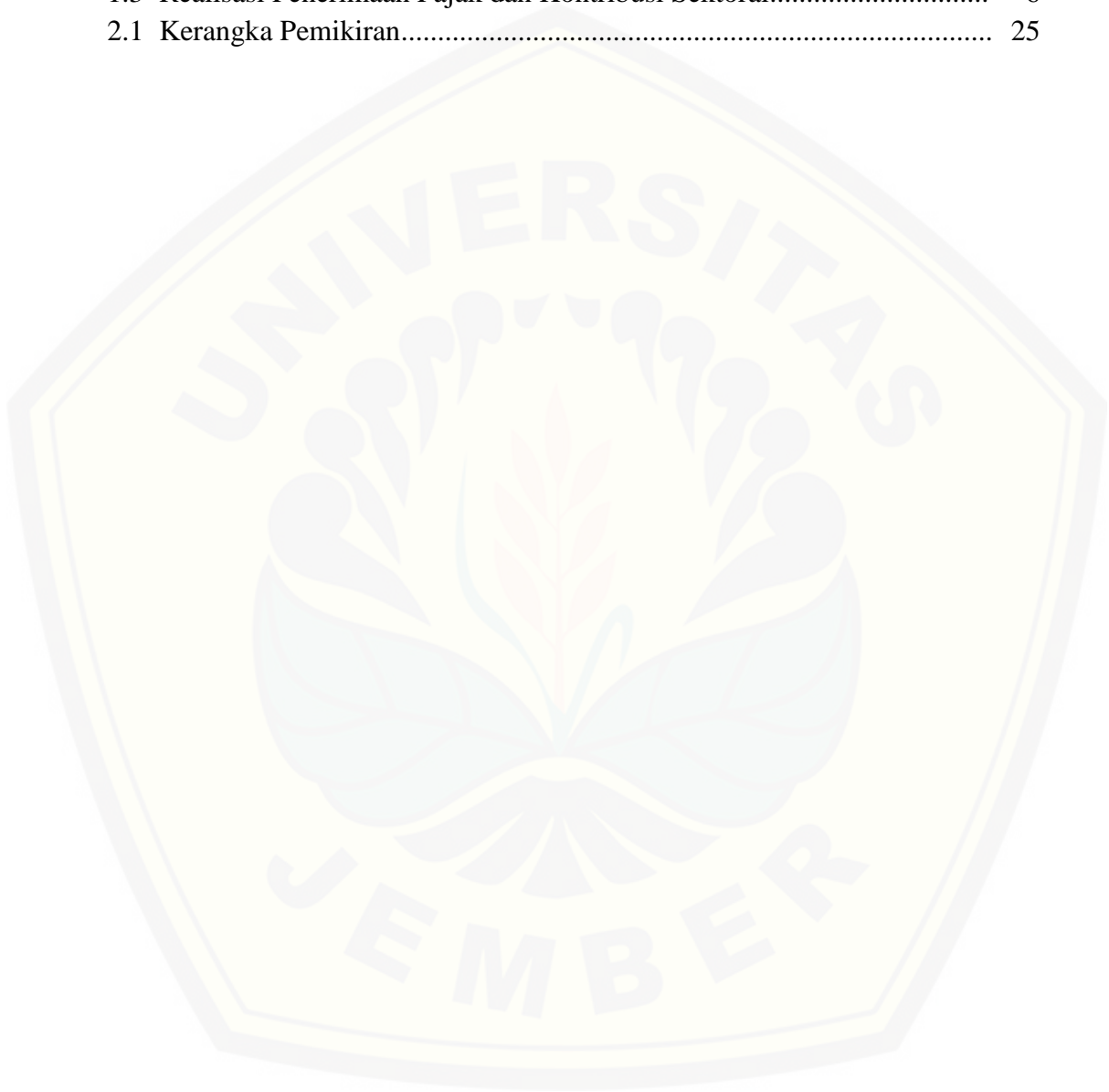
4.3.1 Uji Normalitas.....	38
4.3.2 Uji Multikolinearitas.....	39
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	40
4.3.4 Uji Autokorelasi.....	41
4.4 Hasil Uji Hipotesis.....	41
4.4.1 Regresi Linear Berganda.....	41
4.4.2 Uji Kelayakan Model	43
4.4.3 Uji Koefisien Determinasi.....	43
4.4.4 Uji Signifikansi Variabel.....	44
4.5 Interpretasi Hasil.....	45
4.5.1 Pengaruh Pengungkapan Aspek Ekonomi Terhadap Praktik Penghindaran Pajak.....	45
4.5.2 Pengaruh Pengungkapan Aspek Lingkungan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak.....	46
4.5.3 Pengaruh Pengungkapan Aspek Sosial Terhadap Praktik Penghindaran Pajak.....	48
BAB 5. PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	51
5.3 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

2.1 Pengungkapan Aspek Ekonomi.....	16
2.2 Pengungkapan Aspek Lingkungan.....	17
2.3 Pengungkapan Aspek Sosial.....	19
2.4 Penelitian Terdahulu.....	23
4.1 Sampel Penelitian.....	36
4.2 Hasil Statistik Deskriptif.....	37
4.3 Hasil Uji Normalitas.....	49
4.4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	40
4.5 Hasil Uji heteroskedastisitas.....	40
4.6 Hasil Uji Autokorelasi.....	41
4.7 Hasil Uji Regresi Linear berganda.....	41
4.8 Hasil Uji kelayakan Model.....	43
4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	43
4.10 Hasil Uji Signifikansi Variabel.....	44

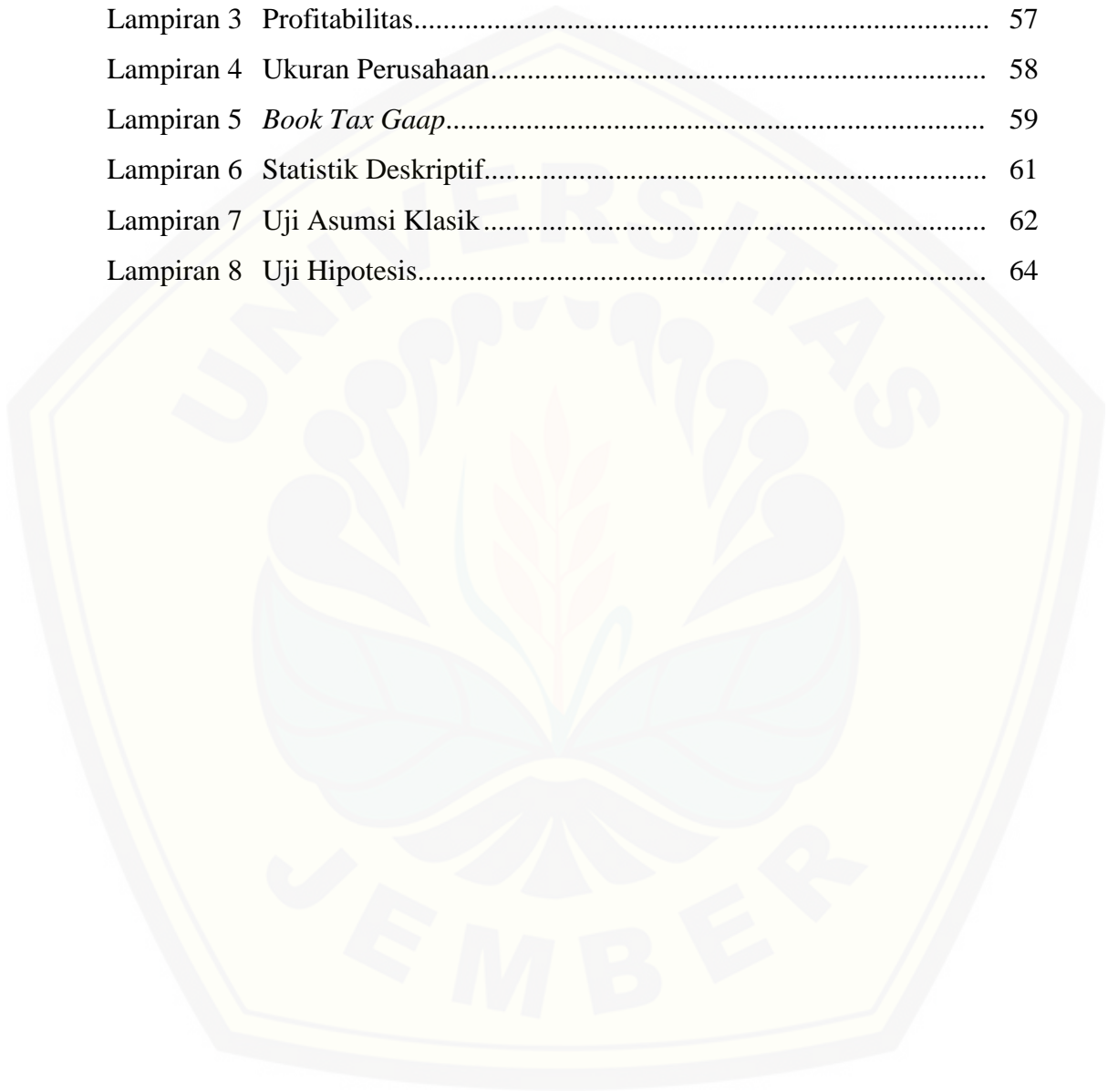
DAFTAR GAMBAR

1.1 Pendapatan Negara.....	1
1.2 Rasio Pajak.....	3
1.3 Realisasi Penerimaan Pajak dan Kontribusi Sektoral.....	6
2.1 Kerangka Pemikiran.....	25



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Sampel Perusahaan.....	55
Lampiran 2	Pengungkapan Aspek <i>Sustainability Reporting</i>	56
Lampiran 3	Profitabilitas.....	57
Lampiran 4	Ukuran Perusahaan.....	58
Lampiran 5	<i>Book Tax Gaap</i>	59
Lampiran 6	Statistik Deskriptif.....	61
Lampiran 7	Uji Asumsi Klasik.....	62
Lampiran 8	Uji Hipotesis.....	64

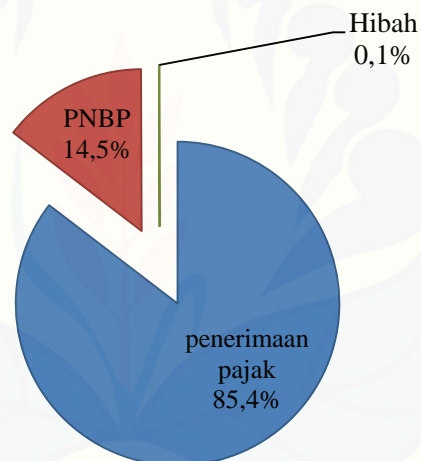


BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber utama pendapatan negara kita. Melalui laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diketahui bahwa pajak menyumbangkan Rp. 1.618,1T dari total Rp. 1.894,7T pendapatan negara. Sisanya sebanyak Rp. 275,4 T merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Rp. 1,2 T berasal dari dana yang dihibahkan.

Gambar 1.1 Pendapatan yang Diterima Negara Tahun 2018



Sumber : www.kemenkeu.go.id

Jika dilihat pada Gambar 1.1, kontribusi penerimaan pajak sangat penting sekali bagi pendapatan negara kita. Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan RI) juga mengatakan pada acara pembukaan *tax amnesty* di Jawa tengah tahun 2016 yang lalu, bahwa pajak merupakan tulang punggung negara dan komponen penting yang dibutuhkan dalam APBN. UU No 28 Th 2007 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan pajak yang telah diterima oleh pemerintah digunakan untuk memberikan kemakmuran bagi rakyat di dalamnya melalui pembangunan nasional. Selain itu dengan adanya penerimaan pajak, negara tidak akan terlalu bergantung kepada negara lain. Pada acara yang berbeda,

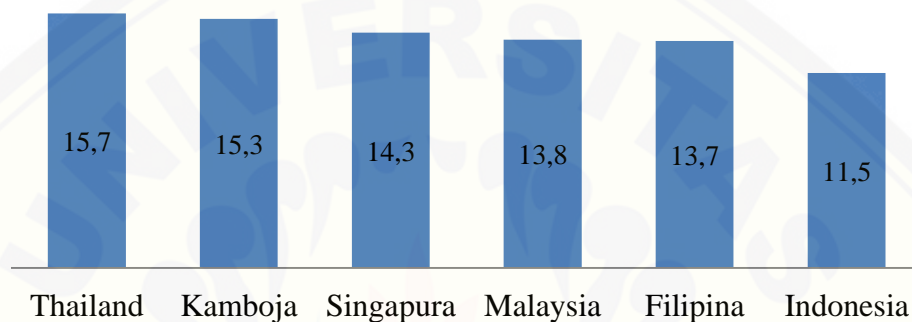
Sri Mulyani berpendapat bahwa tanpa penerimaan pajak, negara tidak punya independensi. Artinya dengan adanya penerimaan pajak, negara akan memiliki kemandiriannya sendiri untuk mengatur segala kegiatan ekonomi dan politiknya sehingga baik peraturan maupun pembangunan yang dilakukan tidak akan diintervensi oleh kepentingan negara lain.

Pentingnya penerimaan pajak bagi negara seharusnya juga didukung oleh warga negaranya untuk melakukan kewajiban membayar pajak. Kewajiban membayar pajak ini pada dasarnya diatur didalam UUD 1945 Pasal 23A yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang” artinya dari awal Indonesia merdeka, masyarakat yang ada di dalamnya telah diwajibkan untuk membayar pajak demi kemajuan bangsa dan negara (Waluyo, 2017:4). Menurut Sri Mulyani (2018) yang dikutip melalui situs www.kemenkeu.go.id, pemungutan pajak di Indonesia itu bersifat adil artinya apabila pendapatannya kecil maka pajak yang dikenakan juga kecil. Begitu juga sebaliknya apabila pendapatan wajib pajak besar maka sudah seharusnya pajak yang dikenakan juga besar. Hal ini sesuai dengan salah satu asas pemungutan pajak yakni asas *equality* yang artinya pajak telah dipungut secara adil disesuaikan dengan kemampuan masing-masing (Hidayat dan ES, 2018:9). Adanya asas tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah telah membuat aturan sedemikian rupa agar pemungutan pajak tidak membebani masyarakatnya dan bersama-sama ikut berkontribusi membangun bangsa. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya kita melaksanakan kewajiban melalui pembayaran pajak.

Perlunya kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya pembayaran pajak ini berpengaruh sekali terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Ketika banyak masyarakat memiliki kesadaran dalam membayar pajak, tingkat penerimaan pajak negara juga semakin tinggi. Namun sebaliknya yang saat ini terjadi di Indonesia, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih sangat rendah sehingga penerimaan pajak juga rendah. Fakta itu dapat dilihat dari rasio pajak Indonesia yang selama 5 tahun berturut-turut hanya berada pada kisaran 10-12 %. Angka tersebut dapat dikatakan rendah karena menurut Dirjen Pajak Indonesia angka

ideal rasio pajak menurut standar internasional itu berada pada kisaran 15 % keatas. Selain tidak ideal, rasio pajak Indonesia juga berada pada urutan terakhir jika bersaing bersama negara tetangga yang memiliki *economy size* serupa dengan negara kita. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan rasio pajak tahun 2018 kemarin.

Gambar 1.2 Rasio Pajak



Sumber : www.kemenkeu.go.id

Dilihat dari Gambar 1.2 diatas, rasio pajak Indonesia hanya berada pada kisaran angka 11,5 %. Angka tersebut masih kalah jauh dengan negara-negara tetangga yang rasio pajaknya sudah berkisar diatas 13 %. Sejalan dengan grafik diatas, dikutip dari situs resmi www.kemenkeu.go.id, Sri Mulyani Indrawati tahun 2018 yang lalu juga berpendapat bahwa kepatuhan membayar pajak warga negara Indonesia memang masih sangat rendah. Selain dari rasio pajak, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak juga dapat dilihat dari banyaknya kasus penghindaran pajak yang masih marak dilakukan di Indonesia. Yenny Sucipto, Sekjen FITRA lembaga transparansi anggaran di Indonesia melalui www.suara.com menduga bahwa angka penghindaran pajak per tahunnya dapat mencapai 110 triliun. Tindakan Penghindaran pajak tersebut paling banyak dilakukan oleh badan usaha yakni sebesar 80 % dan 20 % dilakukan oleh perorangan.

Sebelumnya telah banyak penelitian yang dilakukan untuk meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak ini terutama pada suatu perusahaan atau badan usaha. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya dilakukan

oleh Pradipta dan Supriyadi (2015), Rahmawati dkk (2016), serta Dharma dan Noviari (2017). Pradipta dan Supriyadi (2015) meneliti tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Profitabilitas, *Leverage*, dan Komisaris Independen terhadap praktik penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa CSR dan Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan *leverage* dan komisaris independen tidak berpengaruh. Selanjutnya penelitian Rahmawati dkk (2016) serta Dharma dan Noviari (2017) juga menunjukkan hasil yang serupa bahwa CSR mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian terkait pengungkapan CSR diatas secara konsisten telah menunjukkan adanya pengaruh pengungkapan CSR secara keseluruhan terhadap penghindaran pajak. Dikarenakan hasil penelitian CSR secara umum telah konsisten maka pengembangan penelitian kemudian dilakukan oleh Ranselaar (2016) serta Sari dan Adiwibowo (2017) dengan meneliti secara terpisah aspek-aspek yang ada didalam pengungkapan. Hasil penelitian Ranselaar (2016) menunjukkan bahwa aspek lingkungan dan ekonomi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sementara aspek sosialnya tidak berpengaruh. Sedangkan hasil penelitian Sari dan Adiwibowo (2017) menunjukkan aspek sosial dan ekonominya yang berpengaruh. Adanya perbedaan hasil penelitian terkait dengan pengungkapan CSR secara terpisah yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial dari peneliti-peneliti sebelumnya menjadikan alasan perlunya penelitian lanjutan agar hasil yang didapatkan menjadi lebih pasti.

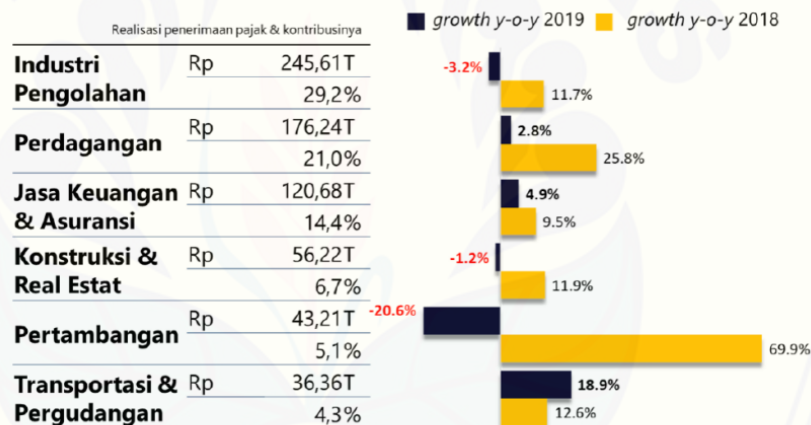
CSR menurut Wisanggeni dan Suharli (2017:157) merupakan suatu konsep yang menunjukkan macam-macam tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan melalui berbagai aspek operasional yaitu aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Perlu diketahui bahwa saat ini pengungkapan CSR sudah dapat dilaporkan dalam bentuk *sustainability reporting* atau laporan keberlanjutan. Hal ini sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POKJ.03/2017 Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik itu wajib menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usaha LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik tersebut”. Melalui website www.globalreporting.org diketahui bahwa

Sustainability reporting adalah bentuk laporan yang dipublikasikan suatu organisasi atau perusahaan berkaitan dengan dampak terhadap aspek ekonomi, lingkungan, serta sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas operasi perusahaannya. Jadi setiap perusahaan penghuni Bursa Efek Indonesia diharuskan melakukan pengungkapan terkait aspek ekonomi, lingkungan dan sosialnya. Aspek ekonomi menurut Saputra dkk (2019:62) mengacu pada pengukuran pemeliharaan maupun peningkatan keberhasilan perusahaan melalui teknologi dan inovasi, kolaborasi, manajemen pengetahuan, pembelian, proses dan pelaporan *sustainability*. Sari dan Adiwibowo (2017) berpendapat tingginya aspek ekonomi yang diungkapkan dapat menyebabkan meningkatnya praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Hal ini dapat terjadi karena pengungkapan aspek ekonomi tidak bertujuan untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat umum tetapi lebih kepada untuk menarik minat pemegang saham dan kreditur dalam memperoleh dana. Berkaitan dengan Aspek lingkungan (Saputra dkk, 2019:62) dapat diartikan sebagai suatu tanggung jawab perusahaan yang diukur dari dampak perusahaan pada penanganan sumber daya seperti udara, air, emisi, dan limbah. Penelitian Renselaar (2016) menunjukkan bahwa pengungkapan aspek lingkungan meningkatkan terjadinya praktik penghindaran pajak. Semakin perusahaan terlibat dengan upaya pengurangan sumber daya, pengurangan emisi, dan inovasi produk maka praktik penghindaran pajak akan semakin besar. Sedangkan aspek sosial (Saputra dkk, 2019:62) berkaitan dengan *corporate governance*, motivasi, insentif, keamanan, dan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, hak asasi manusia, dan perilaku etis. Sari dan Adiwibowo (2017) mengungkapkan semakin tinggi pengungkapan aspek sosial yang dilakukan menunjukkan semakin tinggi pula keprihatinan perusahaan terhadap masyarakat sehingga upaya untuk melakukan penghindaran pajak menjadi lebih kecil.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Pengungkapan *Sustainability Reporting* terhadap Praktik Penghindaran Pajak” dengan variabel yang diteliti yaitu aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sedangkan objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan dari sektor pertambangan, alasannya karena baru-baru ini PT Adaro

Energy yang merupakan salah satu perusahaan sektor tersebut diduga melakukan penghindaran pajak. Menurut laporan LSM Internasional Global Witness, dalam melakukan penghindaran pajaknya PT Adaro melakukan *Transfer Pricing* dengan memindahkan sebagian laba yang dimiliki kepada anak perusahaannya yaitu Coaltrade Services International yang ada di Singapura. Keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas tersebut sebesar 14 juta USD per tahun. Selain itu berdasarkan laporan “APBN KITA : Kinerja dan Fakta” edisi Oktober 2019 diketahui bahwa penerimaan pajak dari sektor pertambangan mengalami perlambatan yang sangat signifikan yaitu 20,6 % dari tahun sebelumnya (Gambar 1.3) sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut.

Gambar 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak dan Kontribusi Sektoral



Sumber : www.kemenkeu.go.id

Penelitian ini juga menambahkan variabel kontrol didalamnya yakni profitabilitas dan ukuran perusahaan. Hal tersebut dikarenakan semakin besar profit dan ukuran suatu perusahaan, semakin besar pula pengaruhnya terhadap pajak yang dibayarkan. Selain itu, pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Darmawan dan Sukartha (2014), Pradipta dan Supriyadi (2015), serta Dewinta dan Setiawan (2016) juga menunjukkan bahwa variabel tersebut secara konsisten terus menunjukkan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain yang dilakukan Santoso dan Muid (2014), Muzakki dan Darsono (2015) serta Sari dan Adiwibowo (2017) juga sudah mulai memasukkan profitabilitas serta ukuran perusahaan sebagai variabel kontrolnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengungkapan aspek ekonomi dalam *sustainability reporting* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?
2. Apakah pengungkapan aspek lingkungan dalam *sustainability reporting* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?
3. Apakah pengungkapan aspek sosial dalam *sustainability reporting* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengungkapan aspek ekonomi *sustainability reporting* terhadap praktik penghindaran pajak
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengungkapan aspek lingkungan *sustainability reporting* terhadap praktik penghindaran pajak
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengungkapan aspek sosial *sustainability reporting* terhadap praktik penghindaran pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Menambah pengetahuan dan pemahaman terkait ilmu akuntansi yang telah didapat selama perkuliahan.
 - b. Memberikan bukti secara empiris pengaruh pengungkapan aspek *sustainability reporting* terhadap praktik penghindaran pajak
2. Manfaat secara praktis, diharapkan :
 - a. Menjadi alarm peringatan bagi pihak manajemen perusahaan agar tidak melakukan penghindaran pajak dan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak
 - b. Sebagai tambahan informasi bagi pengguna laporan keuangan seperti investor untuk pengambilan keputusan investasi
 - c. Memberikan tambahan informasi atau pengetahuan terkait praktik penghindaran pajak kepada peneliti selanjutnya
3. Manfaat secara regulasi

Memberikan pertimbangan kepada pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan perpajakan yang akan dibuat di kemudian hari

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stakeholder*

Menurut Tandiontong (2016:2) *Stakeholder* diartikan sebagai keseluruhan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diangkat. Sedangkan Menurut Biset (Tandiontong, 2016:2) *stakeholder* merupakan seseorang yang memiliki keperluan atau perhatian terhadap permasalahan tertentu. Secara jelas *Stanford Research Institute – SRI* (Hamdani, 2016:34) menjelaskan bahwa *stakeholder* didefinisikan “*any group or individual who can affect or be affected by achievement of an organization’s objective*” artinya *stakeholder* merupakan suatu kelompok atau individu yang mampu memberikan pengaruh atau terpengaruh oleh pencapaian perusahaan.

Galbreath Jeremy (Hamdani, 2016:35) berpendapat bahwa *stakeholder* terbagi menjadi 2 kelompok besar yakni *internal primary stakeholders* dan *external primary stakeholder*. Namun secara umum Galbreath menyatakan *stakeholder* perusahaan terdiri dari *shareholder, investor, customer, suppliers, government, natural environment* dan *local communities*. Sedangkan ODA (Tandiontong, 2016:3) mengelompokkan *stakeholder* ke dalam 3 kelompok besar yaitu *stakeholder* utama, *stakeholder* pendukung, dan *stakeholder* kunci. *Stakeholder* utama adalah orang yang mempunyai kepentingan atau pengaruh langsung terhadap suatu kebijakan tertentu. Jadi *stakeholder* utama menjadi penentu dalam pengambilan keputusan yang akan dilakukan selanjutnya. *Stakeholder* pendukung merupakan orang yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap permasalahan tersebut tapi mereka memiliki kepedulian dan keprihatinan terhadap masalah tersebut sehingga dapat menggerakkan massa maupun pemerintah. Sedangkan *stakeholder* kunci yaitu orang yang mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan yang sah secara hukum.

Paton (Tandiontong, 2016:4) menjelaskan teori *stakeholder* dapat diartikan bahwa perusahaan sebagai suatu unit ekonomi itu bertanggung jawab untuk

melaksanakan kepentingan pemegang saham. Pendapat tersebut didukung oleh Friedman (Hamdani, 2016:171) yang menyatakan pertanggungjawaban sosial suatu perusahaan yaitu dengan menjalankan bisnisnya sesuai keinginan pemilik (*owner/shareholders*), sehingga tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan laba. Jadi apabila suatu perusahaan berusaha untuk melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat luas maka mereka bertentangan dengan keinginan *shareholders*. Namun Lakon (Pradipta dan Supriyadi, 2015) menyatakan didalam teori *stakeholder*, suatu unit bisnis tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan unit itu saja tetapi juga mempunyai tanggung jawab sosial yaitu dengan mempertimbangkan kepentingan dari para pemangku kepentingan lain yang terkena dampak dari keputusan tersebut. Adanya pengakuan terhadap berbagai *stakeholder* selain pemegang saham menyebabkan adanya perubahan tujuan perusahaan yang semula hanya ada tanggung jawab ekonomi yaitu memaksimalkan laba menjadi tanggung jawab sosial perusahaan. Ghozali dan Chariri (2014:493) melanjutkan dalam teori *stakeholder* perusahaan bukan hanya dipandang sebagai unit yang beroperasi untuk kepentingannya sendiri, melainkan juga perlu memberikan manfaat kepada para *stakeholdernya*. Oleh sebab itu, keberadaan suatu perusahaan dipengaruhi dengan adanya dukungan dari para *stakeholdernya*.

Gray *et al* (dalam Ghozali dan Chariri, 2014:439) juga menyatakan karena kelangsungan hidup suatu perusahaan dipengaruhi oleh *stakeholdernya*, maka perusahaan perlu mencari dukungan dari para *stakeholder*. Adanya pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk berkomunikasi dengan para *stakeholdernya*. Lebih lanjut menurut Ulman (dalam Ghozali dan Chariri, 2014:440) suatu perusahaan akan cenderung untuk memilih *stakeholder* yang dianggap paling penting, kemudian mengambil tindakan yang dapat memuaskan *stakeholder* tersebut agar terjalin hubungan harmonis dari keduanya. Gray *et al* (dalam Ghozali dan Chariri, 2014:440) kemudian menyimpulkan bahwa inti dari teori *stakeholder* berkaitan dengan cara-cara yang dilakukan perusahaan untuk menjaga hubungannya dengan para *stakeholder*. Pada dasarnya teori *stakeholder* adalah pendekatan berbasis tekanan pasar, yang mana

penyediaan ataupun penarikan sumber ekonomi akan menentukan pengungkapan sosial lingkungan pada waktu tertentu. Sehingga teori *stakeholder* cenderung mengabaikan informasi pelaporan keuangan termasuk keberadaan hukum dan regulasi yang menghendaki adanya pengungkapan informasi tertentu di dalamnya.

2.1.2 Pajak

Menurut Soemarsaid Moertono (Rahayu, 2017:1) pajak berasal dari istilah jawa yaitu 'ajeg' artinya pungutan yang dibayarkan secara teratur pada waktu tertentu. Pa-ajeg artinya pungutan yang dibayarkan secara teratur dari hasil bumi dengan persentase tertentu yang dilakukan oleh raja atau perangkat desa setempat. Sedangkan menurut UU No 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat dari UU No 6 Tahun 1983 dimaksudkan bahwa pajak merupakan kontribusi terutang yang wajib diberikan oleh individu ataupun badan kepada negara, sifatnya memaksa didasarkan pada Undang-Undang, dan tidak memperoleh imbal balik secara langsung dari pemerintah karena digunakan untuk membiayai keperluan negara guna memakmurkan masyarakatnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak memiliki beberapa unsur, Waluyo (2017:3) menyatakan unsur-unsur tersebut yaitu :

1. pungutan pajak yang dilakukan pemerintah didasarkan pada Undang-Undang serta peraturan yang berlaku,
2. tidak ada timbal balik langsung yang diterima oleh individu-individu yang membayar pajak
3. Negara melakukan pemungutan pajak melalui pemerintah pusat dan pemda
4. hasil pemungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan jika masih ada sisa digunakan untuk membiayai investasi demi kepentingan umum
5. selain sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga digunakan untuk melaksanakan fungsi mengatur (*regulerend*)

Hidayat dan ES (2018:9) menyatakan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah harus dilakukan sesuai dengan asas pemungutan pajak yakni:

1. *Asas equality*, artinya pungutan pajak diharuskan sesuai dengan kemampuan wajib pajak
2. *Asas certainty*, artinya pemungutan pajak harus jelas serta tidak mengenal kompromi.
3. *Asas convenience of payment*, artinya pungutan pajak dilakukan diwaktu yang paling tepat untuk membayar pajak
4. *Asas efisiensi*, artinya pungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya

Waluyo (2017:12) menjelaskan bahwa pajak bisa terbagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan :

1. Golongannya
 - a) Pajak langsung
Pajak ditanggung wajib pajak itu sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain
 - b) Pajak tidak langsung
Pajak bisa dibebankan kepada pihak lain seperti PPN
2. Berdasarkan sifatnya
 - a) Pajak subjektif, artinya besaran tarif pajaknya didasarkan pada kemampuan wajib pajak itu sendiri seperti PPh.
 - b) Pajak objektif, artinya besaran tarif pajak yang akan dipungut pemerintah itu didasarkan pada objek atau benda yang dikenai pajak bukan pada diri wajib pajak seperti PPnBM
3. Berdasarkan lembaga yang memungutnya
 - a) Pajak Pusat, artinya yang memungut pajak merupakan pemerintah pusat
 - b) Pajak daerah, artinya yang memungut pajak merupakan pemerintah daerah

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi saat wajib pajak paham dengan betul tugas dan kebutuhan negara terkait dengan penerimaan pajak, sehingga mereka secara sadar dan aktif melakukan pembayaran pajak. apabila

kesadaran wajib pajak baik maka akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Menurut Rahayu (2017:192) Faktor-faktor yang menghambat kesadaran dari wajib pajak antara lain :

1. Adanya prasangka negatif terhadap fiskus
2. Barriers dari instansi di luar pajak
3. Banyaknya kasus-kasus korupsi yang saat ini terjadi
4. Pembangunan sarana umum yang dirasa belum nampak
5. Tidak transparannya penggunaan anggaran oleh pemerintah dari penerimaan pajak

Menurut Rahayu (2017:192) tinggi rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap pajak bisa dilihat dari :

1. Penerimaan pajak yang dapat mencapai target yang diinginkan
2. Tingkat kepatuhan pajak semakin tinggi
3. Rasio pajak tinggi
4. Jumlah wajib pajak yang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah usia produktif
5. Tagihan pajak menjadi kecil
6. Pelanggaran pajak juga kecil

Pemungutan pajak di Indonesia masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya hambatan yang terjadi saat pemungutan pajak. R. Santoso Brotodihardjo (Hidayat dan ES, 2018:5) mengemukakan hambatan-hambatan tersebut yakni :

1. Perlawanan pasif. Biasanya dalam perlawanan pasif ini masyarakat akan enggan atau malas untuk membayar pajak. hal itu bisa disebabkan karena beberapa hal seperti sulitnya sistem yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak, kurangnya intelektual ataupun moral yang dimiliki masyarakat, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan pungutan pajak.
2. Perlawanan aktif. Dalam perlawanan aktif ini biasanya masyarakat memang sengaja melakukan usaha atau tindakan untuk tujuan menghindari pembayaran pajak. perlawanan aktif itu bisa dilakukan dengan dua cara yakni *tax*

avoidance dan *tax evasion*. *Tax Avoidance* merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau badan usaha untuk mengurangi beban pajak dengan cara mencari celah aturan perpajakan yang bisa dimanfaatkan sehingga tidak melanggar aturan yang berlaku. Sedangkan *tax evasion* tindakannya dilakukan dengan melanggar aturan yang ada seperti penggelapan pajak.

2.1.3 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* menurut Lyons Susan (Suandy, 2016:8) merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk menjelaskan usaha wajib pajak dalam merencanakan '*tax affairs*' tetapi tidak melanggar aturan untuk mengurangi utang pajak yang dimilikinya. Sedangkan Wisanggeni dan Suharli (2017:3) penghindaran pajak merupakan upaya suatu organisasi untuk efisiensi beban pajak dengan penghindaraan pengenaan pajak melalui pengurangan transaksi yang dikenakan pajak dan menjadi objek pajak. Menurut Komite Urusan Fiskal OECD (Suandy, 2016:8) ada 3 karakter penghindaran pajak yakni:

1. Terdapat unsur artifisial didalannya sehingga terkesan bahwa semua aturan telah dipenuhi padahal tidak. Hal ini terjadi akibat tidak adanya faktor pajak
2. Sering melakukan pemanfaatan celah (*loopholes*) atau kelemahan dari UU yang saat ini berlaku
3. Adanya kerahasiaan. Kerahasiaan merupakan salah satu karakter dari penghindaran pajak ini dimana para konsultan pajak biasanya akan memberi tahu wajib pajak bagaimana cara melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak harus menjaga rahasia tersebut.

Modus yang sering dilakukan dalam penghindaran pajak menurut Wisanggeni dan Suharli (2017:5) ada 3 yaitu :

1. Penghindaran pajak secara legal dengan pemanfaatan *grey area* yang ditemukan didalam Undang-Undang pajak.
2. Menggelapkan pajak secara ilegal dengan menutupi kondisi yang sesungguhnya.
3. Menghindari kewajiban perpajakan dengan cara menahan diri untuk tidak membeli produk – produk yang memiliki potensi pajak. Hidayat dan ES

(2018:6) menyatakan tindakan yang sering dilakukan saat mengurangi penggunaan barang-barang yang dikenakan pajak seperti :

- a. Rokok. Seperti yang diketahui bahwa rokok juga dikenakan pajak. Jadi agar terhindar dari pajak, seseorang yang merokok akan cenderung mengurangi konsumsinya terhadap rokok atau memilih membeli rokok dengan pajak yang paling rendah.
- b. Pajak atas bensin. Apabila seseorang ingin menghindari pajak tersebut, maka mereka dapat menggunakan transportasi umum. Selain itu menggunakan transportasi umum juga dapat mengurangi pajak lainnya seperti tol dan retribusi.
- c. Penghindaran PPnBM pengurangan pembelian barang yang tergolong mewah
- d. PPN bisa dihindari melalui pembelian produk-produk lokal

Usaha lain yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak selain menahan diri untuk mengkonsumsi barang yang dikenakan pajak yaitu :

- a. Adanya pengalihan produk. Menggunakan barang yang tidak dikenakan pajak. contoh dari penggunaan kulit sebagai bahan dasar tas dan pakaian kepada karet atau plastik
- b. Pemindaham tempat secara lokal. Seperti pemindahan perusahaan ke tempat yang memiliki tarif pajak lebih rendah
- c. Penghindaran pajak secara yuridis seperti wajib pajak mendirikan suatu perusahaan tapi mereka namakan perkumpulan bukan badan usaha

Upaya penghindaran pajak juga dapat dilakukan melalui CSR. Wisanggeni dan Suharli (2017:159) menyebutkan upaya tersebut dilakukan melalui pengeluaran CSR yang diakui sebagai pengurang pajak. pengeluaran tersebut bisa melalui :

1. Pembelian bahan baku. Bahan baku dalam proses produksi menjadi pengurang penghasilan bruto.
2. Biaya pengelolaan limbah
3. Biaya penelitian dan pengembangan
4. Beasiswa, magang, dan pelatihan
5. Sumbangan dan penanganan darurat bencana
6. Bantuan untuk litbang

7. Bantuan pembangunan dalam rangka perbaikan infrastruktur sosial
8. Bantuan untuk fasilitas/ sarana pendidikan

2.1.4 *Sustainability Reporting*

Dikutip melalui situs www.globalreporting.org, *sustainability reporting* (pelaporan keberlanjutan) merupakan laporan yang dipublikasikan oleh suatu perusahaan/organisasi berkaitan dengan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang terdampak akibat aktivitas operasi perusahaan. *Sustainability reporting* ini juga melaporkan tentang nilai organisasi dan model *corporate governance* yang digunakan, serta mendemonstrasikan hubungan antara strategi perusahaan mereka dan komitmen yang dimiliki untuk mencapai ekonomi global yang berkelanjutan.

Sustainability reporting juga dapat membantu perusahaan untuk mengukur, meningkatkan pemahaman, dan mengkomunikasikan performa ekonomi, lingkungan, sosial serta tata kelola perusahaan yang dimiliki sehingga dapat memasang target dan mengatasi perubahan secara efektif dan efisien. *Sustainability reporting* ini merupakan kunci dasar untuk mengkomunikasikan keberlanjutan dampak dan performa dari perusahaan baik yang bersifat positif ataupun negatif.

Sustainability reporting ini dapat dikatakan memiliki makna yang sama dengan pelaporan nonkeuangan lainnya seperti *triple bottom line reporting*, *corporate social responsibility (CSR) reporting*, dan lainnya. *Sustainability reporting* ini juga merupakan salah satu elemen di dalam *integrated reporting* yang merupakan pengembangan terbaru dengan mengkombinasikan analisis keuangan serta performa nonkeuangan. Keuntungan dari penggunaan *sustainability reporting* ini dibagi menjadi dua yakni keuntungan internal bagi perusahaan itu sendiri dan keuntungan eksternal.

Keuntungan internal *sustainability reporting* antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman terkait dengan risiko dan kesempatan yang dimiliki perusahaan
2. Fokus tidak hanya kepada performa keuangan tetapi juga non-keuangan

3. Berpengaruh terhadap rencana bisnis serta strategi jangka panjang manajemen
4. Mempercepat proses, menurunkan biaya, serta tingkat efisiensi perusahaan meningkat
5. Dapat digunakan untuk mengukur dan menaksir performa keberlanjutan perusahaan dengan mengikuti aturan hukum, norma, aturan, standar performa, dan inisiatif sukarela
6. Terhindar dari keterlibatan pengungkapan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang gagal
7. Dapat digunakan untuk membandingkan performa internal dengan organisasi lain atau sekotr lain

Keuntungan eksternal dari *sustainability reporting* adalah :

1. Mitigasi atau mengurangi dampak lingkungan sosial yang disebabkan perusahaan
2. Meningkatkan brand dan reputasi perusahaan
3. Memungkinkan *stakeholder* eksternal memahami nilai perusahaan, serta aset berwujud dan tak berwujudnya
4. Memperlihatkan bagaimana suatu organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh harapannya tentang pembangunan berkelanjutan

2.1.5 Aspek Ekonomi

Pengungkapan aspek ekonomi menurut *Global Reporting Initiative 2016* sebagai berikut :

Tabel 2.1 Pengungkapan Aspek Ekonomi

Kinerja Ekonomi (GRI 201)	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan serta didistribusikan
	201-2	Implikasi finansial serta risiko maupun peluang lain akibat perubahan iklim
	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya

	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
Keberadaan Pasar (GRI 202)	201-1	Rasio standar upah karyawan <i>entry-level</i> berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional
	201-1	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal
Dampak ekonomi tidak langsung (GRI 203)	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
Praktik Pengadaan (GRI 204)	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal
Anti Korupsi (GRI 205)	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi
	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan maupun prosedur anti-korupsi
	205-3	Insiden korupsi yang terbukti serta langkah yang diambil
Perilaku anti-persaingan (GRI 206)	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik <i>anti-trust</i> dan monopoli

2.1.6 Aspek Lingkungan

Pengungkapan aspek lingkungan menurut *Global Reporting Initiative 2016* sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pengungkapan aspek lingkungan

Material (GRI 301)	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume
	301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan
	301-3	Produk <i>reclaimed</i> dan material kemasannya

Energi (GRI 302)	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi
	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi
	302-3	Intensitas energi
	302-4	Pengurangan konsumsi energi
	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk maupun jasa
Air (GRI 303)	303-1	Pengambilan air berdasarkan sumber
	303-2	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
	303-3	Daur ulang serta penggunaan air kembali
Keanekaragaman hayati (GRI 304)	304-1	Lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan kawasan lindung serta kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
	304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati
	304-3	Habitat yang dilindungi ataupun direstorasi
	304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi
Emisi (GRI 305)	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung
	305-2	Emisi energi GRK (cakupan 2) tidak langsung
	305-3	Emisi GRK (cakupan 3) tidak langsung lainnya
	305-4	Intensitas emisi GRK
	305-5	Pengurangan emisi GRK
	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS)
	305-7	Nitrogen oksida, sulfur oksida serta emisi

		udara lainnya yang signifikan
Air Limbah (Efluen) dan Limbah (GRI 306)	306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan
	306-2	Limbah berdasarkan jenis maupun metode pembuangannya
	306-3	Tumpahan yang signifikan
	306-4	Pengangkutan limbah berbahaya
	306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan ataupun limpahan air
Kepatuhan Lingkungan (GRI 307)	307-1	Ketidapatuhan terhadap UU serta peraturan tentang lingkungan hidup lainnya
Penilaian lingkungan pemasok (GRI 308)	308-1	Seleksi pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
	308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan serta tindakan yang telah diambil

2.1.7 Aspek Sosial

Pengungkapan aspek sosial menurut *Global Reporting Initiative 2016* sebagai berikut :

Tabel 2.3 Pengungkapan aspek sosial

Kepegawaian (GRI 401)	401-1	Perekrutan karyawan baru dan <i>turnover</i>
	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan tetap yang tidak diberikan kepada karyawan sementara maupun paruh waktu
	401-3	Cuti melahirkan
Hubungan tenaga kerja/manajemen (GRI 402)	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional
Kesehatan dan keselamatan kerja (GRI 403)	403-1	Perwakilan pekerja dalam komite resmi gabungan manajemen-pekerja untuk kesehatan dan keselamatan

	403-2	Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat pekerjaan, hari kerja yang hilang, dan ketidakhadiran, serta jumlah kematian terkait pekerjaan
	403-3	Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka
	403-4	Topik kesehatan dan keselamatan tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat buruh
Pelatihan dan pendidikan (GRI 404)	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan
	404-2	Program peningkatan keterampilan karyawan dan bantuan peralihan
	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja serta pengembangan karir
Keanekaragaman dan kesempatan setara (GRI 405)	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan
	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki
Non-diskriminasi (GRI 406)	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan
Kebebasan berserikat dan perundingan kolektif (GRI 407)	407-1	Operasi dan pemasok dimana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko
Pekerja Anak (GRI 408)	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak
Kerja Paksa atau wajib kerja (GRI 409)	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja ataupun wajib kerja

Praktik keamanan (GRI 410)	410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan dan prosedur HAM
Hak-hak masyarakat adat (GRI 411)	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat
Penilaian hak asasi manusia (GRI 412)	412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan HAM atau penilaian dampak
	412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan maupun prosedur HAM
	412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul HAM ataupun yang telah melalui penyaringan
Masyarakat lokal (GRI 413)	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, serta program pengembangan
	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal
Penilaian sosial pemasok (GRI 414)	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial
	414-1	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
Kebijakan publik (GRI 415)	415-1	Kontribusi politik
Kesehatan dan keselamatan pelanggan (GRI 416)	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk maupun jasa
	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
Pemasaran dan pelabelan (GRI 417)	417-1	Persyaratan untuk pelabelan serta informasi produk dan jasa

	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan serta informasi produk dan jasa
	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran
Privasi pelanggan (GRI 418)	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan maupun hilangnya data pelanggan
Kepatuhan sosial ekonomi (GRI 419)	419-1	Ketidakpatuhan terhadap UU dan peraturan di bidang sosial ekonomi

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebelumnya telah dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015) yang pada saat itu meneliti tentang pengaruh CSR, profitabilitas, *leverage*, dan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR dan profitabilitas berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Sejalan dengan hasil tersebut, penelitian Rahmawati dkk (2016) serta Dharma dan Noviari (2017) juga menunjukkan bahwa pengungkapan CSR memang mempengaruhi penghindaran pajak. Hasil penelitian terkait diatas secara konsisten telah menunjukkan adanya pengaruh pengungkapan CSR secara keseluruhan terhadap penghindaran pajak.

Dikarenakan hasil penelitian CSR secara umum telah konsisten maka pengembangan penelitian kemudian dilakukan oleh Ranselaar (2016) serta Sari dan Adiwibowo (2017) dengan meneliti secara terpisah aspek-aspek yang ada didalam pengungkapan. Hasil penelitian Ranselaar (2016) menunjukkan bahwa aspek lingkungan dan ekonomi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Sari dan Adiwibowo (2017) menunjukkan ada pengaruh positif dari pengungkapan ekonomi dan pengaruh negatif dari pengungkapan aspek sosial.

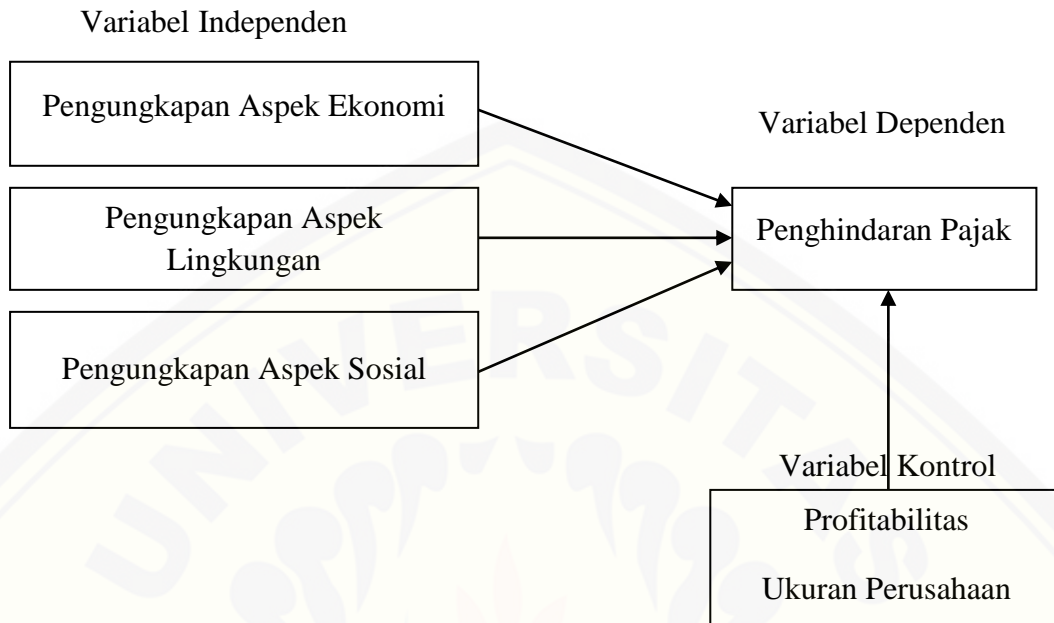
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Pradipta dan Supriyadi (2015)	Pengaruh <i>CSR</i> , Profitabilitas, <i>leverage</i> , Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak	Variabel Dependen: Penghindaran pajak Variabel Independen: a. <i>CSR</i> b. Profitabilitas c. <i>Leverage</i> d. Komisaris Independen	<i>CSR</i> ,profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>leverage</i> , komisaris independen tidak signifikan
2	Rahmawati (2016)	Pengaruh Pengungkapan <i>CSR Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel dependen: <i>tax avoidance</i> Variabel independen : a. <i>CSR</i> b. Kep. Manaj c. Kep. Inst d. Dew. Kom e. Kom. Aud f. Kual. Aud	<i>CSR</i> dan dewan komisaris berpengaruh positif. kep.manaj, institusional berpengaruh negatif. komite dan kualitas audit tidak berpengaruh
3	Dharma dan Noviari (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax</i>	Variabel dependen: penghindaran pajak Variabel independen : a. <i>CSR</i> b. <i>Capital intensity</i>	<i>CSR</i> berpengaruh negatif sedangkan <i>Capital Intensity</i> berpengaruh

	<i>Avoidance</i>		positif terhadap <i>tax avoidance</i>
4	Ranselaar (2016)	<i>The influence of corporate social responsibility on the level of corporate tax avoidance</i>	Variabel dependen: Dimensi ekonomi dan lingkungan Variabel independen : a. Dimensi ekonomi b. Dimensi lingkungan c. Dimensi sosial d. Dimensi tata kelola
5	Sari dan Adiwibowo (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan	Variabel dependen: CSR, CSR dimensi ekonomi, dan CSR dimensi sosial Variabel independen : a. CSR b. CSR dimensi ekonomi c. CSR dimensi sosial Variabel kontrol: a. <i>Leverage</i> b. ROA c. Ukuran perusahaan

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Pengungkapan Aspek Ekonomi Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Menurut Paton (dalam Tandiontong, 2016:4) teori *stakeholder* diartikan bahwa perusahaan sebagai suatu unit ekonomi bertanggung jawab untuk melaksanakan kepentingan pemegang saham. Pendapat tersebut didukung oleh Friedman (Hamdani, 2016:171) yang menyatakan tanggung jawab sosial suatu perusahaan adalah menjalankan bisnisnya sesuai dengan keinginan *owner/shareholders*, sehingga tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan laba dengan menggunakan sumberdaya seefisien mungkin. Membayar pajak dianggap akan mengurangi pendapatan yang akan diterima oleh *shareholder*. Sehingga perusahaan yang memiliki loyalitas tinggi terhadap *owner/shareholders* akan cenderung mengurangi pembayaran pajak yang harus dilakukan. Melakukan sedikit pengungkapan aspek ekonomi merupakan salah satu cara untuk menghindari pembayaran pajak. Pengungkapan aspek ekonomi ini menurut standar GRI berkaitan dengan kinerja ekonomi yang salah satunya adalah

pengungkapan nilai ekonomi langsung yang dihasilkan serta implikasinya. Dengan mengungkapkan sedikit nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dapat mengurangi pembayaran pajak yang dilakukan karena perhitungan pajak biasanya dikaitkan dengan nilai ekonomi yang didapat suatu perusahaan. Selain itu suatu perusahaan juga dapat meningkatkan pengungkapan beban-beban yang dapat mengurangi nilai ekonomi tersebut. Menurut Wisanggeni dan Suharli (2017:159) suatu perusahaan dapat melakukan upaya penghindaran pajak melalui pengeluaran CSR yang diakui sebagai pengurang pajak salah satunya yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Sehingga Kesimpulannya adalah perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak melalui sedikit pengungkapan nilai ekonomi langsung yang dihasilkan serta meningkatkan pengungkapan beban-beban yang termasuk dalam aspek ekonomi untuk mengurangi besarnya pajak yang dibayarkan. Teori tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Ranselaar (2016) serta Sari dan Adiwibowo (2017) yang menunjukkan bahwa pengungkapan aspek ekonomi berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H1 : Adanya pengungkapan aspek ekonomi dalam *sustainability reporting* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak

2.4.2 Pengungkapan Aspek Lingkungan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Ghozali dan Chariri (2014:493) berpendapat dalam teori *stakeholder* perusahaan tidak hanya dipandang sebagai unit bisnis yang beroperasi untuk kepentingannya sendiri, melainkan juga perlu memberikan manfaatnya kepada para *stakeholder*. Gray *et al* (Ghozali dan Chariri, 2014:439) menambahkan karena kelangsungan hidup suatu perusahaan dipengaruhi oleh *stakeholdernya*, maka perusahaan tersebut perlu mencari dukungan dari para *stakeholder*. Adanya pengungkapan lingkungan dianggap sebagai bagian penting dari upaya perusahaan untuk berkomunikasi dan mendapat dukungan dari salah satu

stakeholdernya yaitu masyarakat. Kegiatan yang berkaitan dengan pengungkapan sosial lingkungan dianggap memiliki dampak langsung kepada masyarakat. Pengungkapan aspek lingkungan menurut GRI terdiri dari tanggungjawab perusahaan terhadap penggunaan sumber daya alam (material, energi, dan air), dampaknya terhadap lingkungan sekitar, serta penanganannya terhadap limbah, emisi dan efluen yang terjadi akibat operasi. Adanya pengungkapan aspek tersebut selain dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat juga dapat disalahgunakan perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak. Sesuai pendapat Wisanggeni dan Suharli (2017:159) bahwa upaya penghindaran pajak dapat dilakukan melalui pengeluaran CSR yang diakui sebagai pengurang pajak salah satunya yang terkait dengan pengungkapan aspek lingkungan adalah biaya pengelolaan limbah hasil operasi perusahaan. Penggunaan teknologi canggih atau biaya tambahan lain untuk pengurangan dampak lingkungan perusahaan juga dapat digunakan mengurangi pajak yang dibayarkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pengungkapan aspek lingkungannya semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Penjelasan tersebut didukung oleh hasil penelitian Ranselaar (2016) yang menunjukkan semakin tinggi tingkat pengungkapan aspek lingkungan menjadikan upaya praktik penghindaran pajak juga semakin tinggi. Hal ini dikarenakan menurut Ranselaar (2016) semakin perusahaan terlibat dengan upaya pengurangan sumber daya, pengurangan emisi, dan inovasi produk maka semakin tinggi pula kebutuhan perusahaan akan teknologi yang diperlukan sehingga perusahaan akan cenderung mengurangi pajak yang dibayarkan.

Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H2 : Adanya pengungkapan aspek lingkungan dalam *sustainability reporting* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak

2.4.3 Pengungkapan Aspek Sosial Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Lakon (Pradipta dan Supriyadi, 2015) mengatakan dalam teori *stakeholder* perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap kepentingan perusahaan saja,

tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yaitu dengan mempertimbangkan kepentingan dari semua *stakeholder* yang terkena dampak dari keputusannya. Kartini (2013:9) menyatakan adanya pengakuan terhadap berbagai *stakeholder* ini, menyebabkan adanya perubahan tujuan perusahaan yang semula hanya tanggung jawab ekonomi menjadi tanggung jawab sosial. Ghazali dan Chariri (2014:493) melanjutkan bahwa dalam teori *stakeholder* ini perusahaan juga dipandang harus memberikan manfaat kepada para *stakeholdernya* contohnya masyarakat dan pemerintah. Menurut Watson (2010) perusahaan yang semakin banyak melakukan pengungkapan sosial akan cenderung semakin sedikit melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pengungkapan aspek sosial secara tidak langsung semakin menunjukkan besarnya tanggungjawab perusahaan terhadap para *stakeholder* yang terkena dampak keputusannya, baik itu masyarakat ataupun pemerintah. Perusahaan akan semakin memiliki tanggung jawab untuk memberikan manfaatnya melalui pembayaran pajak sehingga mengurangi upaya penghindaran pajak. Penjelasan tersebut didukung oleh hasil penelitian Sari dan Adiwibowo (2017) yang menunjukkan semakin tinggi pengungkapan aspek sosialnya menyebabkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin kecil.

Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H3 : Adanya pengungkapan aspek sosial dalam *sustainability reporting* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yakni jenis penelitian yang hasil penelitiannya bisa diperoleh melalui prosedur statistik maupun cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kuantitatif memfokuskan perhatiannya terhadap gejala-gejala yang memiliki karakteristik tertentu yang dinamakan variabel. Dalam penelitian ini, hubungan antara variabel-variabel dianalisis menggunakan teori yang objektif. (Sujarweni, 2015:12). Jika dilihat dari karakteristik masalahnya, penelitian ini termasuk kategori penelitian kausal komparatif (*causal-comparatif research*). Penelitian kausal komparatif adalah tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian kausal komparatif termasuk ke dalam tipe penelitian *ex post facto* yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan peristiwa yang sudah terjadi, kemudian menganalisis kembali kejadian tersebut untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi peristiwa tersebut. (Sujarweni, 2015:12)

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang bersifat kuantitatif. Sumber data yang dipakai merupakan data sekunder yaitu data yang telah dipublikasikan oleh pihak atau lembaga terkait. Data tersebut dapat diperoleh melalui situs resmi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI atau melalui situs resmi *global reporting initiative* (<https://database.globalreporting.org/>).

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan semua perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI antara tahun 2014-2018.

3.3.2 Sampel Penelitian

Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria pemilihan sampelnya sebagai berikut :

1. Perusahaan pertambangan yang menyajikan *sustainability reporting*nya antara tahun 2014-2018
2. Perusahaan pertambangan yang menyajikan data yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan ROE, ukuran perusahaan dan BTG

3.4 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang ada dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu variabel dependen, independen, dan kontrol.

3.4.1 Variabel dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variabel utama yang menjadi daya tarik atau fokus peneliti (Chandrarin, 2018:83). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian Santoso dan Muid (2014), pengukuran variabel dependen penghindaran pajak menggunakan *Book Tax Gap* (BTG). Rumus perhitungan BTG :

$$BTG = \ln(\text{pendapatan sebelum pajak} - \text{pendapatan kena pajak})$$

3.4.2 Variabel independen (X)

Variabel independen merupakan variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel dependen, dikenal juga sebagai variabel prediksi atau variabel bebas (Chandrarin, 2018:83). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 yakni pengungkapan aspek ekonomi (SREC), aspek lingkungan (SREN), dan aspek sosial (SRSO). Pengukuran variabel independen ini menggunakan standar pengungkapan *sustainability reporting* yang dikeluarkan GRI (*Global Reporting Initiative*) 2016. Caranya dengan membandingkan jumlah pengungkapan dari masing-masing aspek dengan indikator pengungkapan GRI.

a. Pengungkapan aspek ekonomi (X1)

Pengukuran pengungkapan aspek ekonomi pada penelitian ini disesuaikan dengan standar pengungkapan GRI khusus aspek ekonomi. Pengukurannya

dilakukan dengan model *dummy* artinya untuk item yang diungkapkan diberi skor 1 sedangkan untuk item yang tidak diungkapkan diberi skor 0.

$$SREC_i = -$$

SREC_i: pengungkapan aspek ekonomi perusahaan i

b. Pengungkapan aspek lingkungan (X2)

Pengukuran pengungkapan aspek lingkungan pada penelitian ini disesuaikan dengan standar pengungkapan GRI khusus aspek lingkungan. Pengukurannya dilakukan dengan model *dummy* artinya untuk item yang diungkapkan diberi skor 1 sedangkan untuk item yang tidak diungkapkan diberi skor 0.

$$SREN_i = -$$

SREN_i: pengungkapan aspek lingkungan perusahaan i

c. Pengungkapan aspek sosial (X3)

Pengukuran pengungkapan aspek sosial pada penelitian ini disesuaikan dengan standar pengungkapan GRI khusus aspek sosial. Pengukurannya dilakukan dengan model *dummy* artinya untuk item yang diungkapkan diberi skor 1 sedangkan untuk item yang tidak diungkapkan diberi skor 0.

$$SRSO_i = -$$

SRSO_i: pengungkapan aspek sosial perusahaan i

3.4.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel independen tambahan yang dimasukkan dalam model regresi dengan tujuan untuk meredakan atau meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada dan mungkin timbul dalam proses penelitian (Chandrarin, 2018:86). Pada penelitian sebelumnya ditemukan beberapa variabel yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak sehingga perlu digunakan sebagai variabel kontrol. Variabel kontrol yang digunakan adalah profitabilitas dan ukuran perusahaan.

a. Profitabilitas (X4)

Profitabilitas dapat diukur menggunakan *Return on Equity* (ROE). Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian atas investasi dari pemegang saham. Semakin besar profit yang didapat perusahaan, semakin besar pula tingkat pengembalian investasi dari pemegang saham.

Model perhitungan ROE :

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{total ekuitas}} 100\%$$

b. Ukuran Perusahaan (X5)

Ukuran perusahaan digunakan untuk menggambarkan seberapa besar aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan :

$$Size = \ln(\text{total aset})$$

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan proses analisis yang digunakan untuk menguraikan/memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data, keadaan ataupun fenomena. Statistik deskriptif berfungsi untuk menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Cara yang digunakan dalam mendeskripsikan data antara lain berupa banyaknya data, rata-rata, maximum, minimum, deviasi standar, jangkauan, dan ukuran bentuk data yaitu *skewness* dan kurtosis. (Kesumawati, 2018:7-8)

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan syarat statistik yang perlu dilakukan sebelum analisis regresi linear berganda. Uji ini berfungsi untuk memastikan sampel yang digunakan dalam penelitian bersifat normal, terbebas dari multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Pengujian asumsi klasik yang dipakai peneliti disini antara lain :

a. Uji Normalitas

Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui apakah nilai residu berdistribusi secara normal atau tidak. suatu model regresi dapat dikatakan baik apabila nilai residualnya berdistribusi secara normal (Raharjo, 2017). Uji normalitas yang dipakai pada penelitian ini yakni uji *probability plot* dalam SPSS dengan kriteria:

1. Apabila data atau titik tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garisnya maka dapat dikatakan data terdistribusi normal
2. Apabila data atau titik tersebar menjauhi garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis maka dapat dikatakan data tidak terdistribusi normal

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang satu dengan yang lainnya memiliki pengaruh satu sama lain (multikolinearitas). Jika suatu persamaan regresi diketahui memiliki masalah multikolinearitas dapat dipastikan perubahan dalam satu variabel independen akan diikuti oleh variabel independen lainnya sehingga asumsi *ceteris paribus* untuk variabel lainnya tidak akan terpenuhi bahkan sulit untuk menterjemahkan koefisiennya tersebut (Rachbini dkk, 2018:105). Metode yang digunakan untuk uji multikolinearitas dalam penelitian ini adalah metode *Tolerance* dan VIF SPSS dengan kriteria :

1. Apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ artinya tidak terjadi multikolinearitas
2. Apabila $VIF < 10,00$ artinya tidak terjadi multikolinearitas

c. Uji Heteroskedastisitas

Asumsi mendasar dalam penyusunan model regresi adalah varian error untuk setiap data pengamatan bersifat konstan atau bersifat homogen. Asumsi ini biasanya dikenal dengan sebutan homoskedastisitas. Jika model regresi tidak memenuhi asumsi ini maka model regresi mengalami masalah heteroskedastisitas (Rachbini dkk, 2018:111). Metode pengujian heteroskedastisitas yang dipakai peneliti disini yaitu dengan metode uji park SPSS. Metode ini dilakukan dengan cara meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat dengan variabel independen, kriterianya :

1. Apabila signifikansi (Sig) $> 0,05$ maka tidak terdeteksi masalah heteroskedastisitas
2. Apabila signifikansi (Sig) $< 0,05$ maka terdeteksi masalah heteroskedastisitas

d. Uji Autokorelasi

Asumsi lain dalam model regresi adalah tidak adanya autokorelasi atau korelasi serial antar sisaan. Metode yang digunakan dalam mendeteksi masalah

autokorelasi pada penelitian ini adalah SPSS uji *Run test* (Rachbini dkk, 2018:117). Kriterianya :

1. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi
2. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi

3.6 Uji Hipotesis

3.6.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan Analisis regresi linear berganda sebagai alat uji hipotesisnya. Rachbini dkk (2018:88) menjelaskan analisis regresi linear berganda adalah suatu model yang dependennya bergantung pada dua atau lebih variabel independen. Analisis ini berguna untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis regresi linear berganda juga merupakan pengembangan dari analisis regresi sederhana (Kesumawati, 2018:127). Penggunaan analisis regresi linear berganda dapat membantu kita mengetahui pengaruh pengungkapan aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial terhadap penghindaran pajak pada suatu perusahaan. Persamaan regresi linier berganda didalam penelitian ini sebagai berikut :

$$\text{LnBTG} = a + \beta_1 \text{SREC} + \beta_2 \text{SREN} + \beta_3 \text{SRSO} + \beta_4 \text{ROE} + \beta_5 \text{LnSIZE} + \varepsilon$$

Keterangan :

LnBTG = Logaritma natural selisih laba sebelum pajak dan laba kena pajak

a = konstanta

β_{1-5} = koefisien regresi

SREC = pengungkapan aspek ekonomi

SREN = pengungkapan aspek lingkungan

SRSO = pengungkapan aspek sosial

ROE = Profitabilitas

LnSIZE = Logaritma natural total aset perusahaan

ε = koefisien error

3.6.2 Uji Kelayakan Model (Uji f)

Chandrarin (2018:140) mengatakan uji kelayakan model (uji *goodness of fit*) dilakukan guna menguji apakah model persamaan regresi linear berganda yang sudah diformulasikan sudah tepat (*fit*). Kriteria pengujian :

- a. $Pvalue \leq 0,05$ menunjukkan bahwa model regresi sudah layak digunakan pada penelitian
- b. $Pvalue > 0,05$ menunjukkan bahwa model regresi tidak layak digunakan pada penelitian

3.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 adalah uji yang menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen (Chandrarin, 2018:141). Nilai koefisien determinasi yang tinggi dapat menjadi salah satu indikator untuk menilai model empirik yang baik. Sebaliknya jika hasil uji koefisien determinasi rendah, tidak berarti model empiriknya buruk karena koefisien determinasi bukan satu-satunya indikator yang dapat menunjukkan baik tidaknya suatu model yang diformulasikan.

3.6.4 Uji Signifikansi Variabel (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang diformulasikan dalam model (Chandrarin, 2018:142). Uji ini merupakan uji lanjutan setelah dilakukan uji f. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05 ($\alpha = 5\%$) dengan kriteria :

- a. Apabila $sig > 0,05$ atau $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka hipotesis ditolak
- b. Apabila $sig \leq 0,05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka hipotesisnya diterima

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengungkapan aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial dalam *sustainability reporting* terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 menggunakan analisis regresi linier berganda. Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Hipotesis pertama (H1) diterima. Pengungkapan aspek ekonomi dalam *sustainability reporting* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Hal ini dikarenakan semakin besar beban-beban ekonomi yang diungkapkan semakin mengurangi nilai ekonomi yang menjadikan pajak dibayarkan lebih sedikit.
2. Hipotesis kedua (H2) ditolak. Pengungkapan aspek lingkungan dalam *sustainability reporting* tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Pengungkapan aspek lingkungan yang dilakukan perusahaan semata-mata sebagai upaya perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara efektif, efisien, dan ekonomis untuk mengurangi risiko habisnya sumber daya dan kerusakan terhadap bumi agar dapat digunakan sampai generasi masa depan sehingga keberlanjutan perusahaan perusahaan dan bumi ini lebih terjamin.
3. Hipotesis ketiga (H3) ditolak. Pengungkapan aspek sosial dalam *sustainability reporting* tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Sesuai dengan teori stakeholder karena kelangsungan hidup suatu perusahaan dipengaruhi oleh stakeholdernya, maka perusahaan perlu mencari dukungan dari para stakeholder. Melalui pertanggungjawaban sosial, keberadaan perusahaan akan lebih diterima secara sosial sehingga lebih menjamin kelangsungan perusahaan di masa depan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang ditemukan selama penelitian antara lain :

1. Belum banyaknya perusahaan pertambangan yang membuat *sustainability reporting* menyebabkan peneliti kesulitan dalam mencari sampel untuk penelitian.
2. Pengukuran penghindaran pajak yaitu *book tax gap* masih berupa taksiran dan bukan angka sebenarnya (*real*) karena data sebenarnya mengenai laba fiskal dan pajak yang dibayarkan perusahaan *go public* tidak dipublikasi oleh Dirjen Pajak sehingga hasil pengukurannya mungkin belum akurat dan merepresentasi keadaan yang sebenarnya.
3. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) besarnya 54,2 % artinya masih ada variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi penghindaran pajak diluar model yang telah diformulasikan.

5.3 Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya :

1. Menggunakan perusahaan dari sektor lainnya seperti keuangan, manufaktur, pertanian dan lainnya untuk mengetahui apakah hasil penelitian ini dapat digeneralisasikan terhadap sektor lainnya.
2. Menggunakan pengukuran selain BTG seperti ETR atau pengukuran lain yang lebih akurat untuk mengetahui apakah hasil penelitian ini dapat dibandingkan ataupun mengalami perbedaan setiap kali alat ukurnya berbeda.
3. Menggunakan variabel lain selain variabel dalam penelitian ini karena melihat dari koefisien determinasi ternyata masih ada saja faktor lain yang bisa mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. "about sustainability reporting". diakses 6 November 2019
<https://www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting/Pages/default.aspx>
- _____. "Benefits of reporting". diakses 6 November 2019
<https://www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting/Pages/reporting-benefits.aspx>
- _____. "GRI Standards 2016". diakses 6 November 2019 melalui
<https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/>
- Chandrarini, Grahita. 2018. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta : Salemba Empat
- Darmawan dan Sukartha. 2014. Pengaruh Penerapan *Corporate Governance, Leverage, Return on Assets*, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN : 2302-8556
- Dewinta dan Setiawan. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN : 2302-8556
- Dharma, NBS dan Noviari N. 2017. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN : 2302-8556, Vol.18.1
- Ghozali, Imam dan Chariri, Anis. 2014. Teori akuntansi. Semarang : Universitas Diponegoro
- Hamdani. 2016. *GOOD CORPORATE GOVERNANCE : Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media
- Hidayat, Nurdin dan ES Dedi P. 2018. Perpajakan : *Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers
- Himawan, Adhitya. (2017, November 30). Fitra: Setiap Tahun, Penghindaran Pajak Capai Rp. 110 Triliun. *Suara.com*. Diakses pada 6 November 2019 melalui
<https://www.google.com/amp/s/amp.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap-tahun-penghindaran-pajak-capai-rp110-triliun>
- Kartini, Dwi. 2013. *Corporate Social Responsibility : Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditaman
- Kementerian Keuangan RI. (2016). Menkeu: Pajak Merupakan Tulang Punggung Nasional. *Kemenkeu*. Diakses pada 6 November 2019 melalui
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-pajak-merupakan-tulang-punggung-nasional/>

- Kementerian keuangan RI. (2018). APBN 2018. *Kemenkeu*. Diakses pada 30 Oktober 2019 melalui <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>
- Kementerian Keuangan. 2019. APBN Kita edisi Oktober 2019. *Kemenkeu*. diakses pada 6 November 2019 melalui <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita/>
- Kementerian Keuangan RI. (2018, November 12). Menkeu: Tanpa Pajak, Negara Tidak Punya Independensi. *Kemenkeu*. Diakses pada 6 November 2019 melalui <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-tanpa-pajak-negara-tidak-punya-independensi/>
- Kementerian Keuangan RI. (2018, November 14). Menkeu: Kepatuhan Membayar Pajak Masih Rendah. *Kemenkeu*. Diakses pada 6 November 2019 melalui <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-kepatuhan-membayar-pajak-masih-rendah/>
- Kementerian Keuangan RI. (2019). Meningkatkan Rasio Pajak. *kemenkeu*. Diakses pada 6 November melalui <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/infografik/meningkatkan-rasio-pajak/>
- Kementerian Keuangan RI. (2019). Undang-Undang No 16 Tahun 2009. Diakses pada 6 November melalui <https://www.kemenkeu.go.id/>...PDFUndang-UndangKUP>
- Kesumawati, Nila dkk. 2018. *Pengantar Statistika Penelitian*. Depok : PT Rajagrafindo Persada
- Madarina, Amalia dan Ardiyanto, Moh Didik. 2017. *Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak*. Semarang : Universitas Diponegoro Jurnal Akuntansi Vol 8 Nomor 4
- Muzakki dan Darsono. 2015. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak. Diponegoro Journal of Accounting Vol 4, Nomor 3, Hal 1-8. ISSN : 2337-3806
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017, Juli 27). POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Ojk. Diakses pada 6 November 2019 melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-Penerapan-Kuangan-Berkelanjutan-bagi-Lembaga-Jasa-Kuangan,-Emiten,-dan-Perusahaan-Publik.aspx>
- Pradipta, Dyah H dan Supriyadi. 2015. *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Jurnal Akuntansi Volume 13
- Rachbini, Widarto dkk. 2018. *STATISTIKA TERAPAN “Cara Mudah dan Cepat Menganalisis Data”*. Jakarta : Mitra Wacana Media

- Rahayu, Siti K. 2017. *PERPAJAKAN :Konsep dan Aspek Formal*. Bandung : Rekayasa Sains
- Raharjo, Sahid. 2017. Uji SPSS. Diakses Februari 2020 melalui https://www.youtube.com/channel/UC_OsNnxRkff41tMnNIKMZLA
- Rahmawati dkk. 2016. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol.10 No. 1. <https://Perpajakan.studentjournal.ub.ac.id>
- Ranselaar, Jos Van. 2016. *The influence of corporate social responsibility on the level of corporate tax avoidance*. Business and Economics. Uppsala University. www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A904414&dswid=-5720
- Sari dan Adiwibowo. 2017. *Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran pajak Perusahaan*. Diponegoro Journal of accounting Vol 6, Nomor 4 ,Tahun 2017, Halaman 2 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18201>
- Santoso dan Muid. 2014. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Diponegoro Journal of Accounting Vol 3, Nomor 4 Halaman 1.
- Saputra, Komang AK dkk. 2019. *Akuntansi Sosial dan Lingkungan*. Sidoarjo : Indomedia Pustaka
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak edisi 6*. Jakarta : Salemba Empat
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian – Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : Pustakabarupress
- Sugianto, Danang. (2019, Juli 05). Mengenal Soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro. *Detik.com*. Diakses pada 6 November 2019 melalui <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal--penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>
- Tandiontong, Mathius. 2016. *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung : Alfabeta
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Widiyant Fang. 2019. Tutorial Uji Park untuk Mengatasi Gejala Heteroskedastisitas. Diakses melalui <https://youtu.be/6W-IPWwsonk>
- Wisanggeni, Irwan dan Suharli, Michell. 2017. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Mitra Wacana Media

LAMPIRAN 1**DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN**

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN	TGL LISTED
1	ANTM	PT Aneka Tambang tbk.	27 November 1997
2	BUMI	PT Bumi Resources tbk	18 Juli 1990
3	ELSA	PT Elnusa tbk.	25 Januari 2008
4	INCO	PT Vale Indonesia tbk.	16 Mei 1990
5	INDY	PT Indika Energy tbk	11 Juni 2008
6	ITMG	PT Indo Tambangraya Megah tbk.	18 Desember 2007
7	MEDC	PT Medco Energy Internasional tbk.	13 September 1994
8	PTBA	PT Bukit Asam tbk.	3 Desember 2002
9	PTRO	PT Petrosea tbk.	21 Mei 1990
10	TINS	PT Timah tbk	27 Desember 1995

LAMPIRAN 2

PENGUNGKAPAN ASPEK *SUSTAINABILITY REPORTING*

Perusahaan	Tahun	Ekonomi	Lingkungan	Sosial
ANTM	2014	4	21	14
	2015	10	22	28
	2016	4	8	9
	2017	4	17	14
	2018	3	15	14
BUMI	2016	7	11	26
ELSA	2017	3	7	6
	2018	2	0	3
INCO	2014	11	15	15
	2015	11	20	22
	2016	1	4	2
	2017	2	7	0
	2018	6	14	10
INDY	2014	4	1	4
	2015	4	1	3
	2016	4	3	4
	2017	2	3	4
	2018	2	3	4
ITMG	2014	7	14	12
	2015	6	15	7
	2016	5	12	6
	2017	1	5	1
	2018	1	5	2
MEDC	2014	3	18	7
	2017	1	1	7
	2018	1	1	9
PTBA	2014	3	6	4
	2015	13	28	28
	2016	10	12	20
	2017	6	4	6
	2018	12	16	26
PTRO	2014	3	7	5
	2015	2	6	5
	2016	6	11	6
	2017	8	6	12
	2018	7	11	10
TINS	2017	9	11	20
	2018	9	12	20

LAMPIRAN 3

PROFITABILITAS

Perusahaan	Tahun	Laba Setelah pajak	Total Ekuitas	ROE
ANTM	2014	-775.286.289	11.929.561.267	-6,499
	2015	-1.440.852.896	18.316.718.962	-7,866
	2016	64.806.188	18.408.795.573	0,352
	2017	136.503.269	18.490.403.517	0,738
	2018	874.426.593	19.739.230.723	4,430
BUMI	2016	120.255.710	-2.784.774.807	-4,318
ELSA	2017	250.754	3.051.920	8,216
	2018	276.316	3.300.200	8,373
INCO	2014	172.271	1.785.353	9,649
	2015	50.501	1.833.957	2,754
	2016	1.906	1.834.589	0,104
	2017	-15.271	1.819.367	-0,839
	2018	60.512	1.883.727	3,212
INDY	2014	-30.616.975	913.941.778	-3,350
	2015	-76.847.028	831.544.408	-9,241
	2016	-104.230.726	741.109.568	-14,064
	2017	321.633.157	1.115.022.320	28,845
	2018	97.862.189	1.127.184.121	8,682
ITMG	2014	200.971	884.620	22,718
	2015	63.107	834.557	7,562
	2016	130.709	907.430	14,404
	2017	252.703	958.139	26,374
	2018	258.756	969.783	26,682
MEDC	2014	13.716.763	920.318.758	1,490
	2017	131.808.773	1.402.672.048	9,397
	2018	-28.372.936	1.387.261.307	-2,045
PTBA	2014	2.019.214	8.670.842	23,287
	2015	2.037.111	9.287.547	21,934
	2016	2.024.405	10.552.405	19,184
	2017	4.547.232	13.799.985	32,951
	2018	5.121.112	16.269.696	31,476
PTRO	2014	2.356	192.244	1,226
	2015	-12.691	178.277	-7,119
	2016	-7.825	170.449	-4,591
	2017	11.887	188.828	6,295
	2018	23.166	191.132	12,120
TINS	2017	508.914	6.061.493	8,396
	2018	574.813	6.521.881	8,814

LAMPIRAN 4

UKURAN PERUSAHAAN

Perusahaan	Tahun	Total Aset	LN Total Aset
ANTM	2014	22.044.202.220.000	30,72
	2015	30.356.850.890.000	31,04
	2016	29.981.535.812.000	31,03
	2017	30.014.273.452.000	31,03
	2018	33.306.390.807.000	31,14
BUMI	2016	41.681.074.553.200	31,36
ELSA	2017	4.855.369.000.000	29,21
	2018	5.657.327.000.000	29,36
INCO	2014	29.037.323.600.000	31,00
	2015	31.578.975.995.000	31,08
	2016	29.901.710.512.000	31,03
	2017	29.596.405.332.000	31,02
	2018	31.893.707.412.000	31,09
INDY	2014	28.491.982.512.480	30,98
	2015	29.665.391.685.745	31,02
	2016	24.484.867.115.084	30,83
	2017	49.256.536.799.844	31,53
	2018	53.144.584.947.333	31,60
ITMG	2014	16.263.409.120.000	30,42
	2015	16.255.517.585.000	30,42
	2016	16.254.765.312.000	30,42
	2017	18.407.166.324.000	30,54
	2018	20.892.144.168.000	30,67
MEDC	2014	33.618.439.174.760	31,15
	2017	69.918.326.790.636	31,88
	2018	76.059.913.835.826	31,96
PTBA	2014	14.812.023.000.000	30,33
	2015	16.894.043.000.000	30,46
	2016	18.576.774.000.000	30,55
	2017	21.987.482.000.000	30,72
	2018	24.172.933.000.000	30,82
PTRO	2014	5.818.586.080.000	29,39
	2015	5.867.951.560.000	29,40
	2016	5.286.058.300.000	29,30
	2017	5.918.362.512.000	29,41
	2018	8.045.513.271.000	29,72
TINS	2017	11.876.309.000.000	30,11
	2018	15.117.948.000.000	30,35

LAMPIRAN 5

BOOK TAX GAAP (BTG)

Perusahaan	Tahun	laba sebelum pajak	PKP	nilai BTG
ANTM	2014	-542.389.437.000	-200.616.572.000	-341.772.865.000
	2015	-1.493.691.078.000	-887.674.959.000	-606.016.119.000
	2016	336.369.260.000	253.251.627.000	83.117.633.000
	2017	660.465.055.000	575.710.806.000	84.754.249.000
	2018	1.267.510.944.000	1.094.059.037.000	173.451.907.000
BUMI	2016	-1.792.160.121.020	-1.694.835.420.448	-97.324.700.572
ELSA	2017	-12.554.000.000	45.446.000.000	-58.000.000.000
	2018	-32.881.000.000	48.369.000.000	-81.250.000.000
INCO	2014	2.947.421.640.000	3.604.241.200.000	-656.819.560.000
	2015	963.277.260.000	1.514.759.975.000	-551.482.715.000
	2016	69.396.940.000	601.973.108.000	-532.576.168.000
	2017	-311.874.960.000	275.606.964.000	-587.481.924.000
	2018	1.196.376.777.000	2.170.267.470.000	-973.890.693.000
INDY	2014	-901.745.943.040	-240.192.863.520	-661.553.079.520
	2015	-223.723.406.015	405.900.162.220	-629.623.568.235
	2016	-1.033.046.960.256	-209.421.221.700	-823.625.738.556
	2017	-605.528.442.564	26.362.660.308	-631.891.102.872
	2018	-1.269.166.841.271	26.804.331.000	-1.295.971.172.271
ITMG	2014	1.786.048.120.000	1.334.314.400.000	451.733.720.000
	2015	1.621.753.995.000	1.216.305.150.000	405.448.845.000
	2016	700.687.400.000	524.004.000.000	176.683.400.000
	2017	4.499.290.800.000	3.385.035.540.000	1.114.255.260.000
	2018	4.128.822.720.000	3.096.617.040.000	1.032.205.680.000
MEDC	2014	-605.843.462.920	-807.008.389.080	201.164.926.160
	2017	-1.439.610.195.492	102.996.813.924	-1.542.607.009.416
	2018	-859.824.044.253	-226.273.792.284	-633.550.251.969
PTBA	2014	2.778.221.000.000	2.232.709.000.000	545.512.000.000
	2015	2.747.162.000.000	2.564.536.000.000	182.626.000.000
	2016	2.803.704.000.000	2.506.414.000.000	297.290.000.000
	2017	5.821.471.000.000	6.120.913.000.000	-299.442.000.000
	2018	6.791.972.000.000	6.001.965.000.000	790.007.000.000
PTRO	2014	273.742.200.000	124.275.600.000	149.466.600.000
	2015	-132.169.895.000	-71.692.615.000	-60.477.280.000
	2016	-118.196.492.000	-293.052.596.000	174.856.104.000
	2017	213.408.096.000	52.918.488.000	160.489.608.000
	2018	499.884.120.000	519.476.913.000	-19.592.793.000
TINS	2017	685.756.000.000	699.856.000.000	-14.100.000.000
	2018	763.860.000.000	636.016.000.000	127.844.000.000

Perusahaan	Tahun	Nilai BTG	Reverse Score	LN BTG
ANTM	2014	-341.772.865.000	4.796.640.151.136	29,20
	2015	-606.016.119.000	5.060.883.405.136	29,25
	2016	83.117.633.000	4.371.749.653.136	29,11
	2017	84.754.249.000	4.370.113.037.136	29,11
	2018	173.451.907.000	4.281.415.379.136	29,09
BUMI	2016	-97.324.700.572	4.552.191.986.708	29,15
ELSA	2017	-58.000.000.000	4.512.867.286.136	29,14
	2018	-81.250.000.000	4.536.117.286.136	29,14
INCO	2014	-656.819.560.000	5.111.686.846.136	29,26
	2015	-551.482.715.000	5.006.350.001.136	29,24
	2016	-532.576.168.000	4.987.443.454.136	29,24
	2017	-587.481.924.000	5.042.349.210.136	29,25
	2018	-973.890.693.000	5.428.757.979.136	29,32
INDY	2014	-661.553.079.520	5.116.420.365.656	29,26
	2015	-629.623.568.235	5.084.490.854.371	29,26
	2016	-823.625.738.556	5.278.493.024.692	29,29
	2017	-631.891.102.872	5.086.758.389.008	29,26
	2018	-1.295.971.172.271	5.750.838.458.407	29,38
ITMG	2014	451.733.720.000	4.003.133.566.136	29,02
	2015	405.448.845.000	4.049.418.441.136	29,03
	2016	176.683.400.000	4.278.183.886.136	29,08
	2017	1.114.255.260.000	3.340.612.026.136	28,84
	2018	1.032.205.680.000	3.422.661.606.136	28,86
MEDC	2014	201.164.926.160	4.253.702.359.976	29,08
	2017	-1.542.607.009.416	5.997.474.295.552	29,42
	2018	-633.550.251.969	5.088.417.538.105	29,26
PTBA	2014	545.512.000.000	3.909.355.286.136	28,99
	2015	182.626.000.000	4.272.241.286.136	29,08
	2016	297.290.000.000	4.157.577.286.136	29,06
	2017	-299.442.000.000	4.754.309.286.136	29,19
	2018	790.007.000.000	3.664.860.286.136	28,93
PTRO	2014	149.466.600.000	4.305.400.686.136	29,09
	2015	-60.477.280.000	4.515.344.566.136	29,14
	2016	174.856.104.000	4.280.011.182.136	29,08
	2017	160.489.608.000	4.294.377.678.136	29,09
	2018	-19.592.793.000	4.474.460.079.136	29,13
TINS	2017	-14.100.000.000	4.468.967.286.136	29,13
	2018	127.844.000.000	4.327.023.286.136	29,10

LAMPIRAN 6

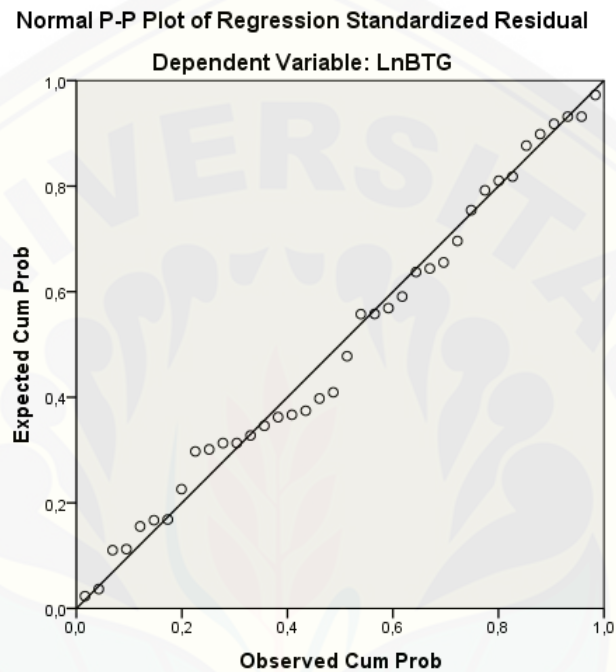
STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Aspek Ekonomi	38	1	13	5,18	3,455
Aspek Lingkungan	38	0	28	9,82	6,841
Aspek Sosial	38	0	28	10,39	8,069
ROE	38	-14,06	32,95	7,6246	12,24081
LnSize	38	29,21	31,96	30,6339	,72119
LnBTG	38	28,84	29,42	29,1459	,12842
Valid N (listwise)	38				

LAMPIRAN 7

UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas



2. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	26,381	,717		36,780	,000		
	Ekonomi	,019	,009	,520	2,095	,044	,233	4,298
	Lingkungan	-,007	,003	-,346	-1,926	,063	,443	2,257
	Sosial	-,005	,004	-,292	-1,115	,273	,209	4,793
	ROE	-,006	,001	-,550	-4,434	,000	,932	1,073
	LnSize	,092	,023	,517	3,951	,000	,837	1,195

a. Dependent Variable: LnBTG

3. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-18,456	12,307		-1,500	,143
	Aspek Ekonomi	-,163	,158	-,341	-1,032	,310
	Aspek Lingkungan	-,031	,058	-,126	-,527	,602
	Aspek Sosial	,060	,072	,293	,838	,408
	ROE	,044	,022	,327	1,978	,057
	LnSize	,417	,400	,182	1,043	,305

a. Dependent Variable: Ln_Res2

4. Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,00675
Cases < Test Value	19
Cases >= Test Value	19
Total Cases	38
Number of Runs	18
Z	-,493
Asymp. Sig. (2-tailed)	,622
a. Median	

LAMPIRAN 8

UJI HIPOTESIS

1. Uji Kelayakan Model (Uji f)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,331	5	,066	7,562	,000 ^b
	Residual	,280	32	,009		
	Total	,610	37			

a. Dependent Variable: LnBTG
b. Predictors: (Constant), LnSize, Aspek Lingkungan, ROE, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,736 ^a	,542	,470	,09350

a. Predictors: (Constant), LnSize, Aspek Lingkungan, ROE, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial
b. Dependent Variable: LnBTG

3. Uji Signifikansi Variabel (Uji t)

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	
	B	Std. Error	Beta	t		
1	(Constant)	26,381	,717		36,780	,000
	Aspek Ekonomi	,019	,009	,520	2,095	,044
	Aspek Lingkungan	-,007	,003	-,346	-1,926	,063
	Aspek Sosial	-,005	,004	-,292	-1,115	,273
	ROE	-,006	,001	-,550	-4,434	,000
	LnSize	,092	,023	,517	3,951	,000

a. Dependent Variable: LnBTG